

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografis

Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 56.667 Km^2 . Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo



Gambar 2.1 Peta Kota Probolinggo

Secara administrasi Pemerintahan Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan dan Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan

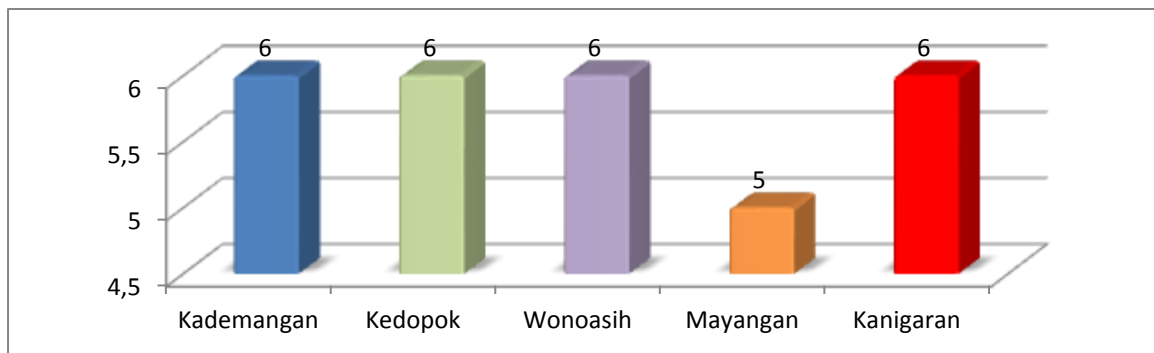
Kelembagaan Kecamatan). Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo

NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH RW	JUMLAH RT
Kademangan	6	32	173
Kedopok	6	35	143
Wonoasih	6	39	182
Mayangan	5	42	258
Kanigaran	6	51	248
Jumlah Total	29	199	1.004

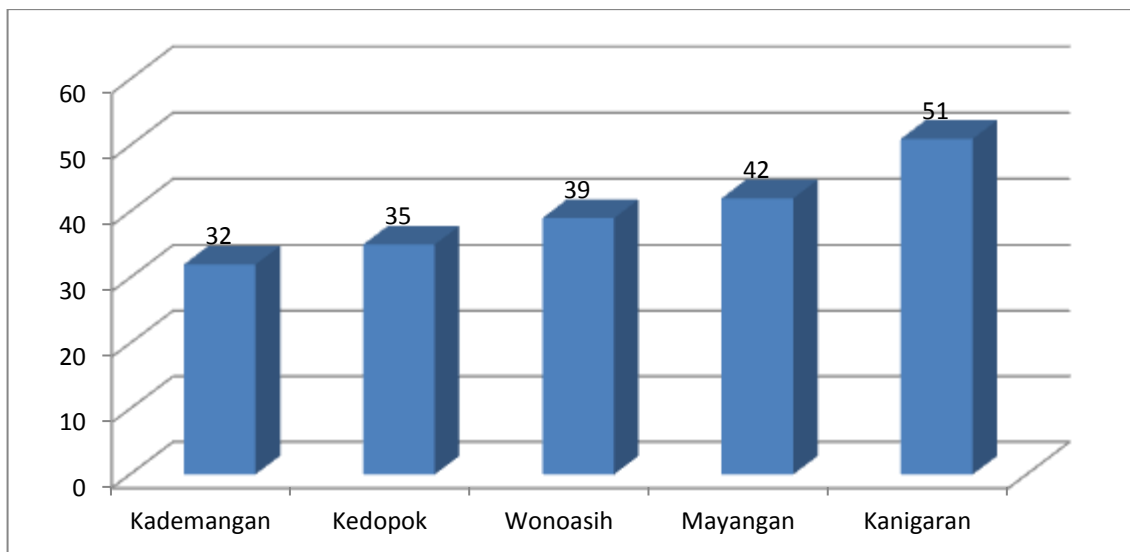
Sumber : Bagian Pemerintahan Kota Probolinggo, 2016

Gambar 2.2 Jumlah Kelurahan Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo



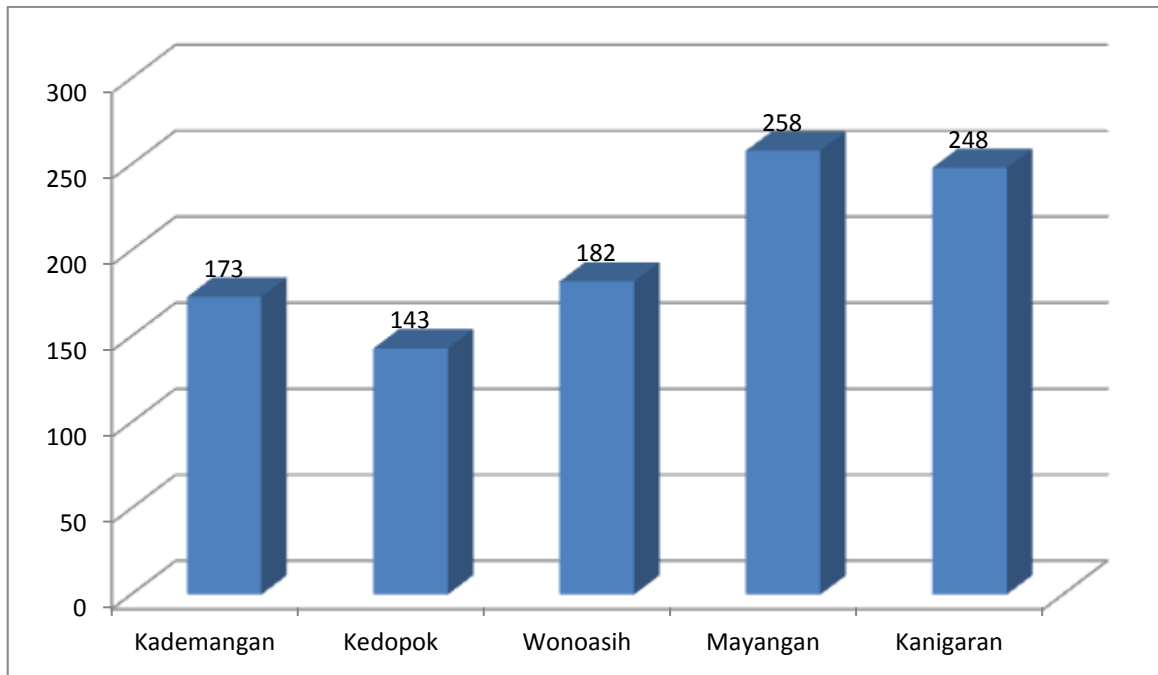
Sumber : Bagian Pemerintahan Kota Probolinggo, 2016

Gambar 2.3 Jumlah RW Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo



Sumber : Bagian Pemerintahan Kota Probolinggo, 2016

Gambar 2.4 Jumlah RT Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo



Sumber : Bagian Pemerintahan Kota Probolinggo, 2016

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari – Mei dan bulan Desember sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan November.

Hampir sepanjang tahun terjadi hujan, Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari - Juli dan bulan Oktober - Desember, di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan "Angin Gending".

2.1.2. Aspek Demografi

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	219.139	220.028	220.767	221.918	224.229
2	Rata-rata kepadatan Penduduk (km ²)	3,867	3,882	3,895	3,916	3,956
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,49	0,4	0,33	0,51	1,04
4	Penduduk Menurut:					
	a. Jenis Kelamin					
	- Laki-laki	108.811	109.334	109.664	110.232	111.219
	- Wanita	110.328	110.694	111.103	111.686	113.010
	b. Sex ratio	98,62	98,77	98,7	98,69	98,41
	c. Angkatan Kerja:					
	- Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	76,12	76,71	77,12	77,80	78,43
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	16,97	18,24	17,32	19,02	21,00
	- Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) %	64,55	68,51	71,29	72,43	73,97

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil, Dinas Tenaga Kerja

Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 224.229 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun bervariasi antara 0,49% hingga 1,04%, Sex ratio mencapai angka rata-rata dibawah 100%, pada akhir tahun 2016 sebesar 98,41 persen artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Ratio jenis kelamin kurang dari seratus ini menandakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki.

Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Probolinggo.

Tabel 2.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

NO	USIA (TH)	2012		2013		2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	0-4	8.617	8.286	6.734	6.420	6.740	6.291	6.595	6.154	6.456	6.144
2	5 - 9	9.635	8.995	9.224	8.705	9.217	8.884	9.166	8.801	9.372	8.980
3	10 - 14	9.714	9.104	9.804	9.207	9.561	8.908	9.532	8.825	9.649	8.956
4	15 - 19	9.002	8.576	9.281	8.568	9.445	8.755	9.390	8.785	9.652	9.045
5	20 - 24	8.768	8.335	8.609	8.380	8.724	8.309	8.836	8.483	9.061	8.677
6	25 - 29	9.326	9.293	8.799	8.527	8.527	8.138	8.447	8.082	8.604	8.236
7	30 - 34	9.319	9.356	9.650	9.704	9.258	9.473	9.280	9.369	8.991	9.029
8	35 - 39	8.724	8.960	8.853	8.925	8.857	8.885	8.885	8.798	9.016	9.139
9	40 - 44	8.901	9.053	8.680	8.808	8.474	8.694	8.374	8.804	8.404	8.816
10	45 - 49	7.167	7.971	7.933	8.488	7.890	8.373	8.133	8.428	8.572	8.825
11	50 - 54	-	-	8.346	7.032	6.486	7.262	6.699	7.529	6.739	7.609
12	55 - 59	6.235	6.656	5.421	5.522	5.759	5.963	5.723	5.972	5.736	6.245
13	60 - 64	4.953	4.955	4.117	4.059	4.190	4.077	4.354	4.417	4.375	4.544
14	65 - 69	3.478	3.512	2.394	2.823	2.625	3.032	2.810	3.046	2.940	3.118
15	70 - 74	2.083	2.615	1.783	2.387	1.848	2.422	1.880	2.482	1.565	2.194
16	>74	2.888	4.660	1.706	3.139	2.063	3.636	2.128	3.711	1.996	3.453

TOTAL	108.810	110.330	110.330	110.694	110.330	111.103	110.232	111.686	111.219	113.010
	219.139		220.028		220.767		221.918		224.229	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sedangkan Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tidak / Belum Sekolah	43.298	46.512	47.502	47.418	47.207
2	Belum Tamat SD	17.514	18.637	18.649	18.977	19.465
3	Tamat SD	55.516	57.307	56.644	56.069	55.075
4	Tamat SLTP	27.876	29.250	29.207	29.339	29.869
5	Tamat SLTA	49.460	52.425	52.678	53.591	55.457
6	Diploma I/II	1.482	1.463	1.397	1.308	1.271
7	Diploma III	2.057	2.209	2.275	2.359	2.461
8	Sarjana (S1)	10.623	11.409	11.552	11.926	12.424
9	Sarjana (S2)	713	800	846	914	980
10	Sarjana (S3)	13	16	17	17	20
11	Tidak Terisi	10.587	-	-	-	-
	TOTAL	219.139	220.028	220.767	221.918	224.229

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat serta fokus seni budaya dan olah raga. Identifikasi terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Metode yang biasa dipergunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. Komponen-komponen dari indikator makro ekonomi tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Laju Inflasi. Indikator ekonomi makro untuk Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ditinjau dari segi pendapatan Kota Probolinggo, PDRB merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul oleh karena ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi diwilayah Kota Probolinggo. PDRB Kota Probolinggo menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha

dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan sub kategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 Revisi 4.

Berdasarkan data series pada tabel 2.5 peranan ekonomi sektoral PDRB Kota Probolinggo tersaji 3 sektor lapangan usaha berturut-turut selama 3 tahun terakhir menduduki posisi tertinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Industri Pengolahan dan sektor Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	ADHK			ADHB		
		2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.56	6.42	6.17	6.94	6.82	6.71
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	16.74	16.68	16.59	15.75	15.72	15.48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0.25	0.24	0.23	0.24	0.22	0.21
F	Konstruksi	6.17	6.05	6.10	6.16	5.97	5.97
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.04	24.17	24.36	24.44	24.73	24.90
H	Transportasi dan Pergudangan	13.45	13.57	13.59	13.17	13.40	13.46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.16	3.25	3.33	3.47	3.66	3.85
J	Informasi dan Komunikasi	5.78	5.86	6.03	5.04	4.94	4.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.96	6.03	6.14	6.58	6.68	6.94
L	Real Estat	3.08	3.08	3.11	2.99	3.02	3.02
MN	Jasa Perusahaan	0.64	0.64	0.63	0.65	0.63	0.62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.93	4.87	4.68	5.19	4.99	4.82
P	Jasa Pendidikan	4.71	4.69	4.68	4.97	4.86	4.88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	0.88	0.89	0.89	0.88	0.89
RST U	Jasa Lainnya	3.56	3.46	3.35	3.43	3.37	3.24
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket :

* : Angka Estimasi Diskominfo

Sumber : BPS Kota Probolinggo

Sementara itu dilihat dari indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo relatif menjadi lebih baik.

Tabel 2.6 Indikator Makro Kota Probolinggo 2012-2016

NO	INDIKATOR MAKRO	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
	a. Jumlah Penduduk	219.139	220.028	220.767	221.918	224.229
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,49	0,40	0,33	0,51	1,04
	c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,49	6,47	5,93	5,86	6,19*
	d. Laju Inflasi (%)	5,88	7,98	6,79	2,11	1,53
	e. PDRB Perkapita (Juta Rp)	26,75	29,32	32,02	35,25	37,96
2.	Kesejahteraan Sosial dan pendidikan					
	a. Angka Melek Huruf (%)	93,35	95,75	96,93	95,73	95,04
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Th)	8,61	8,67	8,97	9,68	9,68
	c. Angka Partisipasi Murni (APM/Th)					
	- SD	101,08	101,20	101,90	101,98	99,87
	- SMP	91,37	95,56	97,58	98,98	95,44
	- SMU	101,87	95,96	95,54	98,08	98,25
	d. Angka Partisipasi Kasar (APK/Th)					
	- SD	110,13	109,93	110,78	111,14	109,05
	- SMP	116,63	118,32	120,45	124,11	122,57
	- SMU	126,19	126,90	127,91	123,63	125,58
3.	Kesehatan					
	a. Angka Harapan Hidup (AHH/Th)	69,46	69,50	69,52	69,72	69,79
	b. Jumlah Kematian Bayi (bayi)	41	72	94	86	98
	c. Angka Kematian Bayi (AKB/1.000KH)	10,95	19,14	24,58	23,37	26,64
	d. Jumlah Kematian Ibu (orang)	4	8	8	3	6
	e. Angka Kematian Ibu (orang/100.000KH)	-	-	-	81,54	163,132
4.	Ketenagakerjaan					
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,12	76,71	77,12	77,80	78,43
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	16,97	18,24	17,32	19,02	21,00
5.	Keuangan Daerah (juta)					
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	69.261	78.355	135.547	142.434	171.376
	b. Dana Perimbangan	458.387	495.412	532.707	555.092	613.830
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	131.055	108.558	205.045	162.462	101.048
	d. APBD	614.208	655.932	833.603	731.680	911.768
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru	68,93	70,05	70,49	71,01	71,5

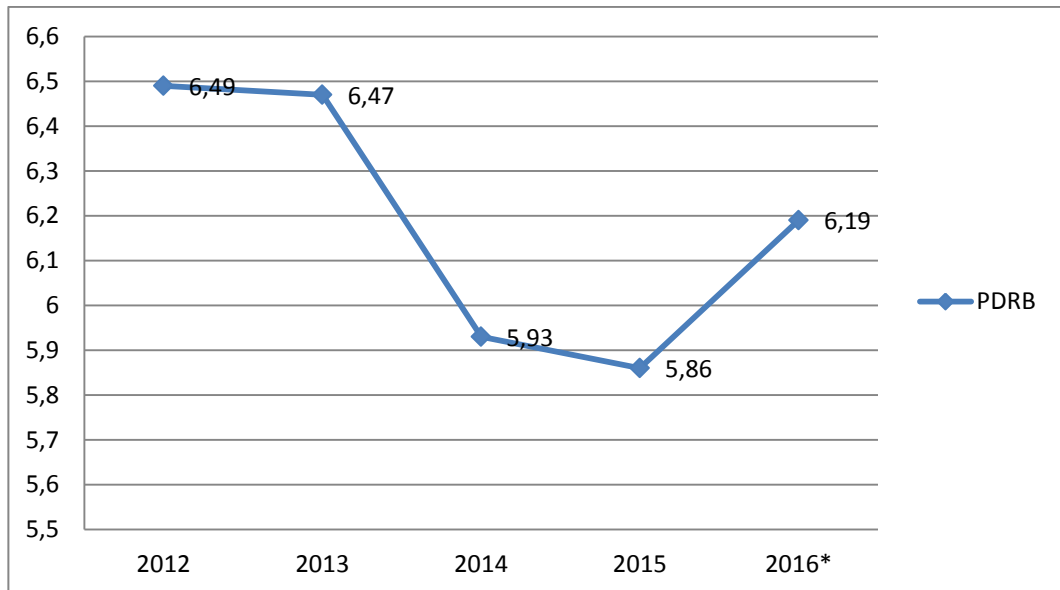
Ket : *) Estimasi Bappeda

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,49%, selanjutnya tahun 2013 tumbuh lebih rendah sebesar 6,47%, kemudian tahun 2014 perekonomian melambat pertumbuhannya menjadi sebesar 5,93% dan melambat kembali hingga sebesar 5,86% pada tahun 2015. Berdasarkan perhitungan estimasi sementara pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2016 tumbuh meningkat 0,33% dari tahun sebelumnya

hingga mencapai 6,19%. Untuk menggambarkan trend pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.5 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo



Sementara itu terkait laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dalam empat tahun terakhir (2012-2016) berada pada trend yang positif, artinya kondisi perekonomian di Kota Probolinggo dapat memberikan pertumbuhan yang positif. Secara lebih detail berikut kami sajikan pada table berikut.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

TAHUN	KOTA PROBOLINGGO	JAWA TIMUR
2012	6,49	6.64
2013	6,47	6,08
2014	5,93	5,86
2015	5,86	5.44
2016	6,19*)	5,55

Ket :

*) : Estimasi Dinas Kominfo Kota Probolinggo

Sumber : BPS Kota Probolinggo, BPS Jawa Timur

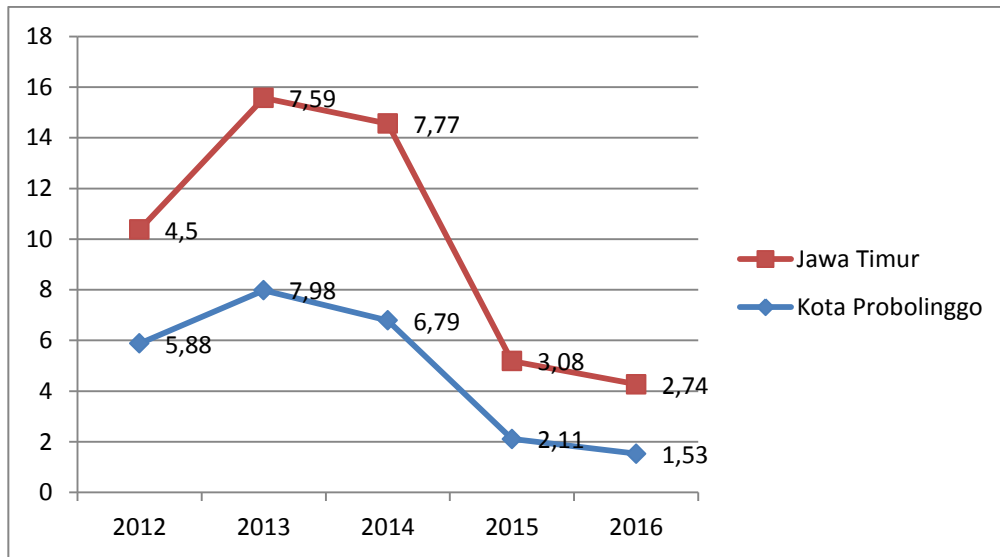
C. Laju Inflasi

Inflasi di Kota Probolinggo pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 lalu. Inflasi tahun 2015 mencapai 2,11 persen, sedangkan pada tahun 2016 turun drastis hingga mencapai 1,53 persen. Inflasi tersebut merupakan angka inflasi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Adapun komoditas yang menyumbang penurunan inflasi Tahun 2016 diantaranya adalah BBM bersubsidi, emas perhiasan, kelompok sandang dan kelompok bahan makanan. Adanya penurunan inflasi ini tidak sepenuhnya dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat, namun hal ini juga merupakan hasil dari

semakin meningkatnya sinergi kerjasama TPID Kota Probolinggo dalam melakukan pengendalian harga. Berikut ini Inflasi Kota Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur :

Gambar 2.6 Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

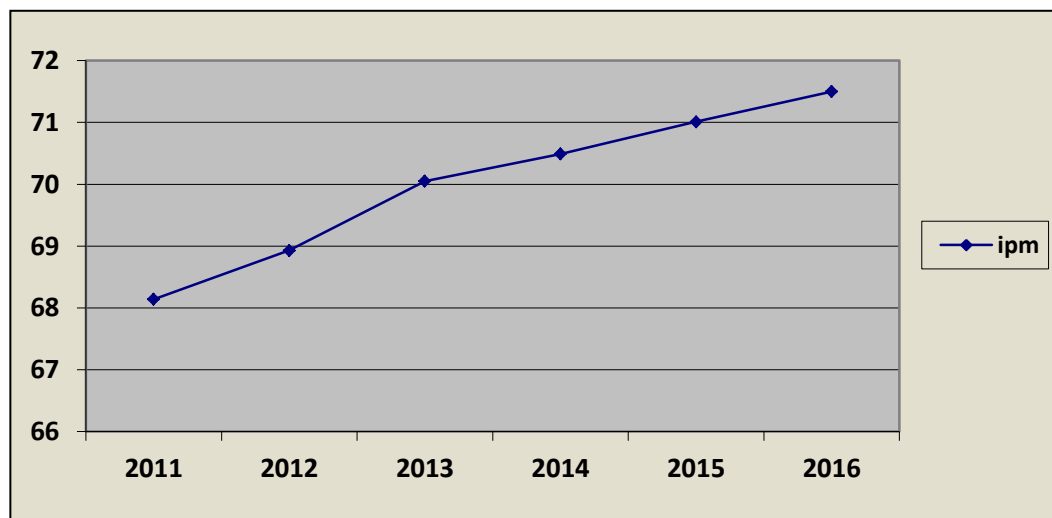
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan terhadap seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat diketahui dari indikator sebagai berikut :

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya (2010-2015). Disamping itu IPM Kota Probolinggo berada di atas rata-rata IPM Propinsi Jawa Timur. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Dengan IPM Kota Probolinggo mengalami trend positif hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

Gambar 2.8Perkembangan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo
Tahun 2011 - 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari analisa yang ada, dukungan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo tersebut antara lain berasal dari :

➤ **Angka Melek Huruf**

Pengukuran dimensi kemampuan menyerap ilmu pengetahuan suatu daerah dilakukan melalui dua hal yaitu Angka Melek Huruf (AMH) umur 15 tahun ke atas dan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Pada tahun tahun 2013 angka melek huruf di Kota Probolinggo mencapai sebesar 95,71 persen lebih baik dari tahun 2012 sebesar 93,35 persen. Pada tahun 2014 angka melek huruf menurun menjadi 95,03 persen. Sedangkan pada Tahun 2015, angka melek huruf meningkat menjadi 95,73 persen dan pada tahun 2016 kembali menurun sebesar 95,04 persen. Pemerintah berupaya terus untuk memberantas buta huruf karena masih ada sebagian penduduk usia 64+ yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Tabel 2. 8 Perkembangan Angka Melek Huruf
Kota Probolinggo Tahun 2012-2016

NO	TAHUN	ANGKA MELEK HURUF
1	2012	93,35
2	2013	95,71
3	2014	95,03
4	2015	95,73
5	2016	95,04

Sumber : Dinas Pendidikan

➤ **Rata-Rata Lama Sekolah**

Tabel 2.9 Perkembangan Rata - Rata Lama Sekolah
Kota Probolinggo Tahun 2011-2015

NO	TAHUN	RATA - RATA LAMA SEKOLAH
1	2012	8,61

2	2013	8,67
3	2014	8,97
4	2015	9,68
5	2016	9,68

Sumber : Dinas Pendidikan

Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Probolinggo mencapai 9,68 tahun yang berarti penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Probolinggo bersekolah hingga tingkat SLTP kelas 3 (bahkan hampir naik ke kelas 1 SMU). Dibanding beberapa tahun yang lalu rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Probolinggo, terus mengalami peningkatan dan semakin melebihi 9 tahun sekolah (setara dengan Kelas 3 SLTP).

Masih kurang optimalnya capaian angka Rata - rata Lama sekolah di Kota Probolinggo dimungkinkan dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, kesadaran masyarakat Kota Probolinggo dalam hal pendidikan memang masih kurang. Masyarakat masih merasa cukup dengan pendidikan tingkat SLTP. Kedua, masyarakat Kota Probolinggo yang berpendidikan tinggi, memilih untuk tidak tinggal di Kota Probolinggo dan memutuskan tinggal di daerah yang lebih mendukung dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Singkatnya, banyak Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Probolinggo yang lari keluar kota untuk pengembangan diri sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Hal ini tentu merupakan kerugian yang besar untuk Kota Probolinggo karena SDM adalah modal dasar bagi pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk memaksimalkan ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan.

➤ **Angka Harapan Hidup**

Untuk menggambarkan situasi derajat kesehatan, digunakan indikator angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB). Angka harapan hidup waktu lahir adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dapat dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah termasuk di dalamnya derajat kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup masyarakat Kota Probolinggo Kota Probolinggo pada tahun 2016 sebesar 69,79. Angka harapan Hidup (AHH) Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan angka harapan hidup ini diimbangi melalui program-program pembangunan kesehatan

lingkungan dan kecukupan gizi dan kalori. Angka Harapan Hidup antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.10 Angka Harapan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2012-2016

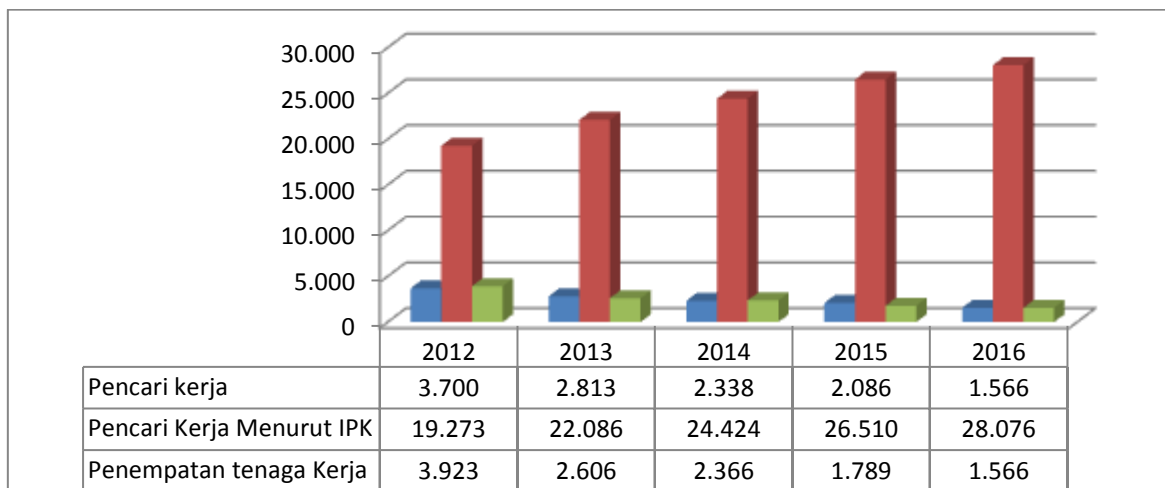
Indikator Makro	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (AHH/Tahun)	69,46	69,50	69,52	69,72	69,79

Sumber : Badan Pusat Statistik

➤ **Kondisi Ketenagakerjaan**

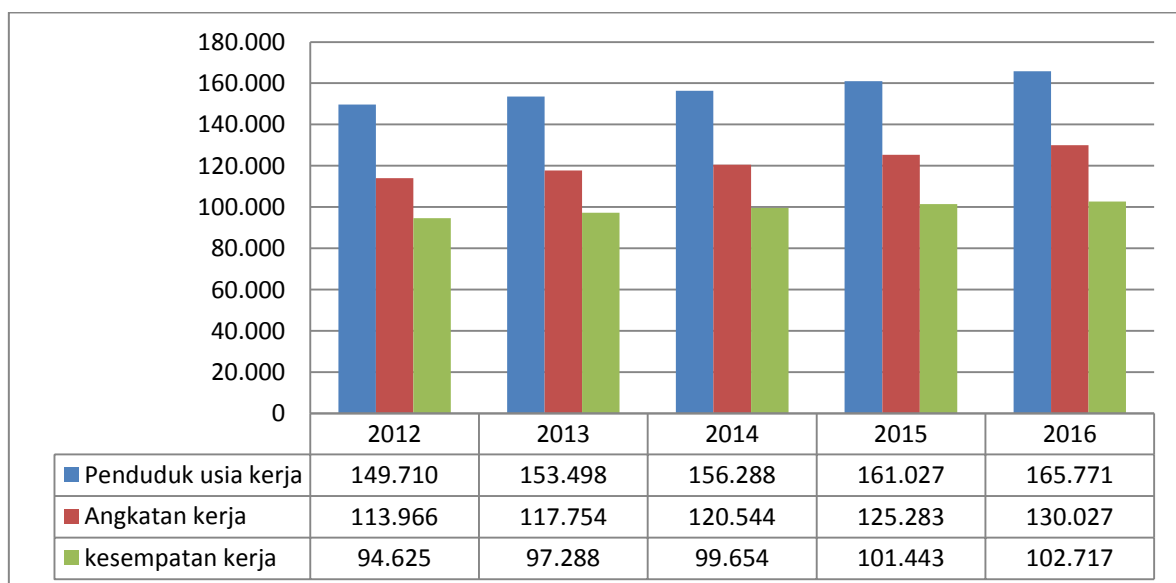
Indikator lain yang juga dapat dipergunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ketenagakerjaan tahun 2011-2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.9 Kondisi Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2012 – 2016



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Gambar 2.10 Peluang Kerja Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2012 – 2016



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo

2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin deras nya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kota Probolinggo diarahkan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Dengan pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat dipertahankan dan terus digali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas yang terus dijaga adalah keberadaan grup kesenian daerah, baik dari segi jumlah grup kesenian yang ada maupun intensitas kegiatannya yang terus diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang.

Strategi pembangunan pemuda selama ini dilakukan dengan cara: (1) membangun moral dan budi pekerti luhur, (2) membangun sarana dan prasarana fisik dan non fisik dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, (3) membangun sumber daya manusia dengan keteladanan, solidaritas, gotong royong, sopan santun, ramah tamah, saling menghormati, saling menghargai dan memelihara kepekaan sosial, (4) dan membangun semangat juang dan cinta tanah air.

Sejarah Kota Probolinggo tidak lepas dari sejarah Kerajaan Majapahit. Pada zaman pemerintahan Raja Majapahit ke IV, yaitu Prabu Radjasanagara atau Sri Nata Hayam Wuruk (1350-1389), daerah Probolinggo dikenal dengan nama "Banger", sesuai dengan nama sungai yang mengalir ditengah daerah ini. Perintah Prabu Hayam Wuruk untuk membuka hutan Banger (babat alas Banger) tersebut jatuh pada tanggal 4 September 1359, dan ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Probolinggo.

Pada era kolonial, Kota Probolinggo merupakan salah satu bekas koloni Belanda yang dilengkapi dengan sistem arsitektur kolonial dengan sistem model kota yang terencana dengan bentuk persegi panjang. Tata letak kota dirancang secara teratur dan simetri dengan sumbu utama Utara-Selatan utama (Kantor Asisten Residen - Alun-alun - Stasiun Kereta Api - Benteng - Pelabuhan).

Masyarakat Kota Probolinggo relatif plural, dengan budaya percampuran antara Jawa dan Madura. Karakteristik masyarakat pesisir yang agamis serta toleran menjadi kekhasan budaya di Kota Probolinggo. Percampuran budaya Jawa dan Madura menjadikan Kota Probolinggo sebagai Kota Pendalungan yang unik dan dapat menjadi daya tarik.

Saat ini, Kota Probolinggo juga tengah giat mengembangkan potensi wisata budaya dengan dikembangkannya Museum Kota dan Museum Dr. Saleh serta upaya-upaya pelestarian dan pengembangan cagar budaya yang ada, seperti benteng.

Wujud pembangunan generasi muda secara nyata adalah: (1) pemberdayaan pemuda untuk membangkitkan potensi pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan, (2) pengembangan pemuda untuk menumbuhkembangkan potensi manajerial, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan (3) perlindungan pemuda dalam pengertian untuk menolong pemuda dalam menghadapi demoralisasi, degradasi, tindakan destruktif, regenerasi dan perlindungan hak dan kewajiban pemuda. Diharapkan di masa depan nanti akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki sikap, intelektualitas dan perilaku luhur.

Pembinaan olah raga selama ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan. pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat, peningkatan kemampuan atlit, pelatih, dan pembina olahraga, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olah raga, dan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Meskipun hasilnya belum cukup menggembirakan, tetapi progres kearah peningkatan prestasi olah raga dapat diwujudkan. Kondisi ini didukung dengan terus berkembangnya klub olah raga di Kota Probolinggo.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan publik, yakni segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara garis besar gambaran umum mengenai aspek pelayanan umum ini dapat dielaborasi dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan pemerintah daerah.

2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas 25 bidang urusan, yaitu :

1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam ikut menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Capaian kinerja pembangunan pendidikan antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.101 Data Layanan Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
	Pendidikan Dasar :					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	110,13	109,93	110,78	111,14	109,05
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	116,63	118,32	120,45	124,11	122,57
3	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	1:163	1 : 164	1 : 165	1 : 181	1 : 181*
4	Rasio Guru/Murid	1:15	1 : 16	1 : 15	1 : 13	1 : 13*
	Pendidikan Menengah:					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM (%)	126,19	126,90	127,91	123,63	125,58
2	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	1 :195	1 : 256	1 : 258	1 : 319	1 : 319*
3	Rasio Guru/Murid	1:10	1 : 10	1 : 11	1 : 10	1 : 10*
	Fasilitas Pendidikan :					
1	Gedung SD/MI dalam kondisi baik	139	139	139	116	116*
2	Gedung SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	80	80	80	72	72*
	Angka Putus Sekolah :					
1	APS SD/MI (%)	0,07	0,05	0,08	0,07	0,07*
2	APS SMP/MTs (%)	0,16	0,23	0,18	0,04	0,04*
3	APS SMA/SMK/MA (%)	1,60	1,40	0,85	0,66	0,66*
	Angka Kelulusan :					
1	AL SD/MI (%)	99,57	100	100	100	100*
2	AL SMP/MTs (%)	99,93	100	100	100	100*
3	AL SMA/SMK/MA (%)	99,18	100	100	100	100*
	Angka Melanjutkan :					
1	AM SD/MI ke SMP/MTs (%)	105,67	121,02	117,38	111,51	111,51*
2	AM SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA (%)	143,68	139,74	135,74	101,17	101,17*

Sumber : Dinas Pendidikan

*: angka sementara

2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan kesehatan di Kota Probolinggo dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Moh. Saleh. Secara umum pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit. Di Kota Probolinggo terdapat 6 Puskesmas pada 5 kecamatan yang memiliki spesialisasi pelayanan secara khusus. Pelayanan Puskesmas ini masih didukung oleh beberapa Puskesmas Pembantu untuk mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah serta beberapa Rumah Sakit Swasta. Rumah sakit umum yang berada di tengah kota juga perlu mendapat perhatian mengingat bahwa secara pengembangan sudah sangat kecil kemungkinan untuk diperluas. Pada sisi lain rumah sakit tersebut harus menjadi jujugan pelayanan masyarakat dari Kabupaten Probolinggo.

Pelayanan RSUD Dr. Moh. Saleh harus semakin ditingkatkan dengan tidak melupakan peningkatan pelayanan pada seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Belajar dari pencapaian kinerja bidang kesehatan pada tahun-tahun sebelumnya bahwa meski sudah maksimal tetapi complain dari masyarakat masih sering terdengar.

Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.112 Data Kinerja Layanan Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio ketersediaan puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik per satuan penduduk	1:30.000	1:30.000	1:1.5984	1:5.725	1:5.725*
2	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1TT:10.000	1TT:10.000	1TT:10.000	1TT:10.000*	1TT:10.000*
3	Rasio dokter per satuan penduduk	1:3.333	1:3.333	1:2.297	1:2.140	1:2.140*
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes	88,88%	92,69%	93,80%	92,95%	92,95%*
5	Cakupan kelurahan UCI	80,66%	82,76%	82,76%	79,31%	79,31%*
6	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%*
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	88,24%	70%	53,43%	61%	61%*
8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%*
9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0%	0,16%	13,49%	17,3%	17,3%*
10	Cakupan Puskesmas	6	6	6	6	6*
11	Cakupan Puskesmas Pembantu	21	21	21	21	21*

Sumber : Dinas Kesehatan

*: angka sementara

3. Pekerjaan Umum

Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.123 Data Kinerja Layanan Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	71,14	74,28	79,5	66,07	66,07*
2	Prosentase Jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi (%)	80	85	85	85	85*
3	Panjang jalan dilalui roda 4 (km)	200,171	200,171	210	199.109	199.109*
4	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	134,08	148,68	151	135,697	135,697*
5	Panjang jalan yang memiliki trotoir dan drainase (min 1,5 m)	14,36	120	120	120	120*
6	Drainase dalam kondisi baik / aliran air tidak tersumbat (km)	107,5	107,7	110,26	110,65	110,65*
7	Pembangunan turap di jalan	62	62	62,65	62,65	62,65*

	penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)					
8	Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)	1.833	1.833	1438	1438	1438*

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

*: angka sementara

4. Perumahan

Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat di Kota Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.134 Data Kinerja Layanan Perumahan Rakyat Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pelanggan rumah tangga berakses air bersih.	17.086	17.630	17.806	19.394	18.252
2	Jumlah rumah tangga bersanitasi lingkungan (%)	59	70	72	72,5	72,5*
3	Jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik	45.414	46.776	49.115	61.888	67.258
4	Perkembangan Jumlah Warga Miskin Yang Memperoleh Fasilitas Perumahan	350	379	390	396	396*

Sumber : Dinas Kesehatan, PLN, dan Dinas Pekerjaan Umum

*: angka sementara

5. Penataan Ruang

Tantangan utama penataan ruang di Kota Probolinggo adalah penyediaan ruang terbuka hijau. Hingga tahun 2015 capaian rasio ruang terbuka hijau baru mencapai 14,50%. Selain itu adalah konsistensi terhadap pemberlakuan peraturan tentang tata ruang. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan meski masih perlu kerja keras untuk mencapai target. Kondisi capaian kinerja pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota Probolinggo dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.145 Data Kinerja Penataan Ruang Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio ruang terbuka hijau kota per satuan luas wilayah (%)	15,02	14	14,5	14,5	14,5*
2	Jumlah bangunan yang memiliki IMB	15,01%	15,69%	16,39%	16,82%	16,82%*

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

*: angka sementara

6. Perencanaan Pembangunan

Kinerja perencanaan pembangunan daerah tingkat capaiannya dapat diukur dari indikator- indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.156 Data Kinerja Perencanaan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012		2013		2014		2015		2016	
		Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk
1	Dokumen RPJPD yang	√		√		√		√		√	

	ditetapkan dengan Perda									
2	Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	√		√		√		√		√
3	Dokumen Renstra SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota	√		√		√		√		√
4	Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwali	√		√		√		√		√
5	Dokumen Renja SKPD	√		√		√		√		√

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016

7. Perhubungan

Kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan dapat digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.167 Data Kinerja Layanan Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah ijin trayek perkotaan	215	215	190	179	189
2	Jumlah uji kir angkutan umum	4.839	4.893	5.095	5.232	4.360
3	Penumpang angkutan umum yang dapat dilayani (%)	100	100	100	100	100
4	Jumlah kepemilikan kir angkutan umum	4.839	4.893	5.095	5.232	5.432
5	Pemasangan rambu - rambu	789	831	873	903	942
6	Biaya pengujian kelayakan angkutan perkotaan	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Sumber : Dinas Perhubungan

8. Lingkungan Hidup

Gambaran umum mengenai capaian kinerja terkait pelaksanaan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.17 Data Kinerja Layanan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Volume Sampah Yang Masuk TPA (Kg/Th)	12.515.063	14.149.665	15.583.056	16.733.235	18.462.536
2	Jumlah TPS per Satuan Penduduk	1 : 2.100	1 : 2.500	1 : 2.700	1:2700	1:2750
3	Penegakan Hukum Lingkungan (kali)	10	12	31	18	8

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

9. Pertanahan

Kinerja pelaksanaan urusan pertanahan tingkat capaiannya dapat digambarkan melalui indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 2.19 Data Kinerja Layanan Pertanahan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tanah yang Bersertifikat	2.985	5.067	8.453	2.644	2.644*
2	Penyelesaian ijin lokasi	1	1	1	0	0*
3	Penyelesaian kasus pertanahan	1	4	3	5	5*

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo

*: angka sementara

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.20 Data Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	92,82	92,51	91,82	92,81	93,51
2	Jumlah Layanan Akta Kelahiran	3.683	4.348	4.362	5.240	4.347
3	Jumlah Kepemilikan KTP	156.556	127.586	160.048	161.921	166.879
4	Jumlah Kepemilikan KK	61.459	63.811	65.011	66.142	71.881

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat capaian kerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.21 Data Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	2.410	2.335	2.342	2.285	2.235
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	49,84	49,9	49,9	49,9	50,11
3	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	12.654	10.511	9.661	10.891	14.251
4	Persentase jumlah pekerja dibawah umur	-	-	-	-	-

Sumber : BPPKB

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tingkat capaian kerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.22 Data Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1 - 2	1-2	1-2	1,4	1,24

2	Jumlah akseptor KB	36.159	36.167	34.370	35.323	34.397
3	Jumlah Pasangan Usia Subur PUS	49.330	49.380	46.799	46.774	44.091
4	Presentase akseptor KB Terhadap PUS	73,30%	73,24%	73,44%	75,52%	78,01%

Sumber : BPPKB

13. Sosial

Gambaran umum kondisi daerah terkait pelaksanaan pembangunan sosial tingkat capaian kerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.23 Data Kinerja Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	8.445	7.575	10.218	5.944	8.474
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	7.443	6.321	6.600	3.444	7.336
3	Persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri	15,15%	16,94%	32,43%	39,93%	39,94%
4	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	150	302	345	336	2.171
5	Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	15	15	15	15	15

Sumber : Dinas Sosial

14. Ketenagakerjaan

Tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo dapat digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 2.24 Data Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penduduk usia kerja	149.710	153.498	156.288	161.027	165.771
2	Angkatan kerja	113.966	117.754	120.544	125.283	130.027
3	Kesempatan Kerja	94.625	97.288	99.654	101.443	102.717
4	Penganggur terbuka	19.341	21.479	20.890	23.840	27.310
5	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	14	15	12	11	15

Sumber : Dinas Tenaga Kerja

15. Koperasi dan UKM

Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.185 Data Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Probolinggo Tahun 2012- 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah seluruh koperasi	299	305		252	252*
1	Jumlah koperasi aktif	201	202	206	197	197*
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	32	38	38	38	38*
3	Jumlah BPR/LKM	21	21	21	21	21*

4	Usaha Mikro dan Kecil	3.853	5.257	5.358	5.463	5.463*
---	-----------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

*: angka sementara

16. Penanaman Modal

Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan penanaman modal daerah di Kota Probolinggo antara lain dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.26 Data Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah investor berskala nasional (Jumlah PMA/PMDN)	20	17	43	48	64
2	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	806.304.399.178	516.923.720.960	2.269.779.452.592	1.824.377.467.526	740.612.581.171
3	Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah	3.551 jenis usaha	3.555 jenis usaha	3.626 jenis usaha	3.206 jenis usaha	4.424 jenis usaha

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

17. Kebudayaan

Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.197 Data Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah sarana seni dan budaya	1	2	2	2	2
2	Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya	3	4	7	22	23
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	1	1			
	• Jumlah benda yang dilestarikan (unit)		550	555	615	615
	• Jumlah situs yang dilestarikan (unit)		2	2	2	2
	• Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)		1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

18. Kepemudaan dan olah raga

Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga salah satunya dapat dilihat dari indikator jumlah organisasi pemuda dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.28 Data Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Probolinggo
Tahun 2012 - 2016**

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah organisasi pemuda	10	8	9	8	30
2	Jumlah organisasi olah raga	24	26	23	25	25
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	2	4	37	16
4	Jumlah kegiatan olah raga	5	5	6	15	37
5	Gelanggang/balai remaja	5	5	5	5	5
6	Lapangan olah raga	250	250	252	252	252

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.209 Data Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016**

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (kali)	2	2	2	2	2*
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	3	3	3	3	3*

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2016

*: angka sementara

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran keadaan tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dijelaskan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.30 Data Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Kota Probolinggo**

Tahun 2011 - 2015

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	5	5	5	5	5*
2	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	21 : 464	21 : 464	22 : 464	22:464	22:464*
3	Jumlah Pelanggaran K3	141	130	155	155*	155*
4	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (ada / tidak)	ada	ada	ada	ada	ada
5	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (ada / tidak)	ada	ada	ada	ada	ada
6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	5,64 km ²	5,64 km ²	5,64 km ²	5,64 km ²	5,64 km ²

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2016

*: angka sementara

21. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 31 Data Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi pangan utama (beras/ton)	8.696,8	8.321	9.291,35	9.931,26	9.942
2	Produksi pangan utama (jagung/ton)	31.944	29.017	30.196,8	28.133	35.000

Sumber : Dinas Pertanian, 2016

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.32 Data Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kelompok binaan LPM	29	29	29	29	29
2	Jumlah kelompok binaan PKK	34	34	34	34	34
3	Jumlah PKK aktif	34	35	35	35	35
4	Jumlah Posyandu aktif	216	216	216	218	218*
5	Jumlah LSM aktif	45	45	45	45	45

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kantor PKK, Dinas Kesehatan, BPPKB

*Angka perkiraan

23. Statistik

Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan statistik salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.33 Data Kinerja Urusan Statistik Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan dokumen PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan dokumen IPM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Ketersediaan dokumen Kota Probolinggo dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Ketersediaan dokumen monografi daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Ketersediaan dokumen IKM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Ketersediaan dokumen IHK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2016

24. Kearsipan

Gambaran kondisi daerah terkait dengan kinerja pelaksanaan urusan kearsipan daerah dapat dijelaskan berdasar indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.34 Data Kinerja Urusan Kearsipan Kota Probolinggo Tahun 2012- 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	35	40	40	40	40
2	Jumlah Pengelola arsip yang telah mendapatkan pelatihan / pembinaan	29	29	29	69	69
	- Petugas Pengelolaan arsip Kelurahan	29	29	29	29	29
	- Petugas pengelola arsip SKPD	-	-	-	40	40

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip, 2016

25. Komunikasi dan Informatika

Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.35 Data Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	39	40	40	40	40
2	Jumlah radio komunikasi yang aktif	1	1	1	1	1
3	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	11	14	17	18	18*
4	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda	-	2	12	12	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

*: angka sementara

26. Perpustakaan

Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan perpustakaan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.36 Data Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah perpustakaan milik Pemda (perpustakaan umum, perpustakaan sekolah negeri, perpustakaan masyarakat)	104	105	105	30**	30**
2	Taman Baca (Taman Baca, TBM Binaan)	2	2	2	2	2
3	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun (perpustakaan umum, perpustakaan sekolah negeri, perpustakaan masyarakat, taman baca, TBM binaan)	193.082	191.973	189.398	214.358	192.922
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (perpustakaan umum)	44.911	45.444	46.524	46.845	48.107

***) TBM tidak masuk dalam data karena wewenang dinas pendidikan

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip

2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas 8 (delapan) urusan. Dari jumlah urusan tersebut, yang secara intensif dapat dilaksanakan di Kota Probolinggo adalah:

1. Pertanian

Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pertanian dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.37 Data Kinerja Urusan Pertanian Kota Probolinggo Tahun 2012- 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produktivitas padi (ton/ha)	6,65	6,65	6,72	6,8	6,85
2	Produktivitas palawija (ton/ha)	7,32	7,45	7,2	7,38	7,00
3	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADH Berlaku)	6,89	6,60	6,94	6,82	6,71*
4	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADH Konstan)	6,92	6,50	6,56	6,42	6,17*

Sumber : Dinas Pertanian, BPS Kota Probolinggo

*= Data Estimasi Diskominfo

2. Pariwisata

Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pariwisata di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.218 Data Kinerja Urusan Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kunjungan wisata	767.717	273.925	465.851	518.086	543.786

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, 2016

3. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.39 Data Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	10.222,90	13.050,570	15.997,331	15.031,334	19.748,586
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	760,78	668,550	492,04	447,383	487,21
3	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	27,9	28,4	31,54	41,041	34,315
4	Cakupan bina kelompok nelayan	54	38	38	39	38

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

4. Perdagangan

Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perdagangan di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.40 Data Kinerja Urusan Perdagangan Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Nilai ekspor bersih perdagangan (dalam juta dolar AS)	65.381	107,43	95,66	60.603	60.603*
2	Jumlah Pedagang yang Memiliki SIUP (dari seluruh klasifikasi)	6.363	7.116	7.568	8.283	8.238*

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

*: angka sementara

5. Perindustrian

Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perindustrian di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.41 Data Kinerja Urusan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertumbuhan jumlah industri	542	636	720	717	717*
2	Jmlh nilai produksi (dlm ribu Rp.)	615.512.445	841.551,75	697.260.148,125	1.863.320.882.090	1.863.320.882.090*
3	Jumlah Perusahaan sektor industri kecil	302	484	702	700	700*

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

*: angka sementara

6. Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan energi dan sumberdaya mineral, secara khusus di Kota Probolinggo sebagaimana karakteristik kota pada umumnya, urusan ini kurang mendapatkan porsi sebagaimana wilayah perdesaan. Perhatian yang berkaitan dengan urusan sumberdaya mineral adalah ditekankan pada keberadaan sumberdaya air tanah di wilayah perkotaan. Dengan kebutuhan air yang terus meningkat maka akan mempengaruhi potensi jumlah air tanah yang terkandung di wilayah kota Probolinggo. Dengan kebutuhan air yang terus meningkat tersebut maka diperlukan suatu penanganan dan manajemen pengelolaan air tanah yang tepat agar tidak cepat habis dan mempercepat intrusi air laut ke daratan. Langkah yang diambil selama ini dalam rangka pengendalian jumlah air tanah adalah dengan pengendalian ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya

saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita / angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah

Untuk kota Probolinggo, indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga tersebut pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.42 Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Per Bulan di Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan	519.361	752.280	935.007	1.011.453	1.175.484
2	Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan)	260.576	327.104	355.449	414.077	465.244
3	Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (non pangan)	258.785	425.176	579.558	597.376	710.240

Ket :

*) : Estimasi BAPPEDA

Sumber : BPS Kota Probolinggo

2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Gambaran dari produktivitas total daerah di Kota Probolinggo tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 2.43 berikut ini :

Tabel 2.43 Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012- 2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**	2016***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**	2016***
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	409.921,43	433.444,28	503.750,13	550.676,17	600.657,85
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	963.921,06	1.052.007,23	1.143.541,72	1.269.242,26	1.384.552,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.102,31	7.115,88	7.338,91	8.312,21	8.755,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.5429,73	16.913,95	17.163,57	18.036,52	19.106,02
F	Konstruksi	367.731,40	401.843,21	447.300,44	481.708,61	533.713,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.452.933,27	1.628.686,06	1.774.454,69	1.996.093,20	2.227.762,44
H	Transportasi dan Pergudangan	749.297,33	827.408,07	955.864,68	1.081.576,15	1.204.031,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187.479,12	213.232,76	251.966,48	295.490,38	344.408,64
J	Informasi dan Komunikasi	306.155,65	341.461,40	366.107,93	398.538,40	438.395,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	358.947,13	418.235,84	477.608,52	539.094,26	621.308,17
L	Real Estat	174.720,73	198.610,53	216.956,82	243.997,00	270.547,75
M, N	Jasa Perusahaan	39.784,68	43.454,66	47.158,22	51.150,28	55.693,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	354.000,47	370.772,01	377.108,00	402.911,29	430.975,41
P	Jasa Pendidikan	291.726,29	329.593,97	360.927,15	392.399,19	436.302,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.084,59	54.800,89	64.468,02	71.079,48	79.980,57
R,S, T,U	Jasa lainnya	217.507,21	226.386,83	248.892,79	271.652,59	290.078,69
	Produk Domestik Regional Bruto	5.945.742,40	6.563.967,59	7.260.608,07	8.071.958,01	8.946.269,84

Ket

***) : Estimasi Diskominfo

Sumber : BPS Kota Probolinggo

2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur kota dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan infrastruktur akan memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multipliereffect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan menyediakan infrastruktur kota salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketersediaan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur perhubungan sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka arus distribusi barang dan orang serta jasa transportasi lainnya akan berjalan lancar. Fasilitas perhubungan yang tersedia di Kota Probolinggo dalam rangka menunjang daya saing daerah tersebut adalah:

Tabel 2.44 Fasilitas Perhubungan Darat di Kota Probolinggo Tahun 2015

No	Uraian	Keterangan
1	Fasilitas Perhubungan Darat	1. Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Tipe A 2. Fasilitas Parkir Angkutan Barang 3. Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Shelter / Halte
2	Fasilitas Perhubungan Laut	-
3	Jumlah orang melalui terminal/stasiun/dermaga per tahun	± 1.550.055 orang

2. Penataan Ruang Kota

Penataan ruang kota yang memungkinkan tersedianya wilayah industri dan niaga akan berdampak pada upaya peningkatan daya saing daerah. Sesuai dengan struktur tata ruang kota Probolinggo, dari luas wilayah kota 56,667 Km². peruntukan kawasan kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.45 Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2016

No.	Penggunaan Lahan	Total (Ha)	%
1	Mangrove	59,06	1,04
2	RTH	10,72	0,19
3	Pertanian	3.042,09	53,68
4	Tambak	124,45	2,20
5	Permukiman	1.860,57	32,83
6	Fasilitas Pendidikan	79,67	1,41
7	Fasilitas Kesehatan	5,21	0,09
8	Fasilitas Peribadatan	7,91	0,14
9	Fasilitas Perkantoran	38,64	0,68
10	Fasilitas Bangunan Umum	4,65	0,08
11	Fasilitas Olahraga (Lapangan)	14,88	0,26
12	Fasilitas Transportasi	107,93	1,90
13	Perdagangan Dan Jasa	102,95	1,82
14	Industri dan Pegudangan	142,44	2,51
15	Kawasan Pertanahan dan Keamanan	17,47	0,31
16	TPA/TPST	5,11	0,09
17	Gardu Induk PLN	4,46	0,08
18	Makam	38,50	0,68
	Jumlah	5.666,70	100,00

Sumber data: Hasil perhitungan peta digital, Bappeda Bidang Fisik

3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangkamenunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka segala urusan yang berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator ketersediaan fasilitas ini dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank yang ada di Kota Probolinggo hingga saat ini.

Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah.

**Tabel 2.46 Kantor Bank Menurut Tipe di Kota Probolinggo
Tahun 2012 - 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016*
	Bank Konvensional					
1.1	Bank Umum	23	20	20	20	20
1.2	BPR	6	15	15	6	6
	Bank Syariah					
2.1	Bank Umum	0	4	4	4	4
2.2	BPR	0	5	5	4	4

Sumber : BPS Kota Probolinggo

*) : Estimasi Bappeda Litbang

4. Fasilitas Hotel dan Penginapan

Ketersediaan fasilitas hotel dan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Apalagi posisi strategis Kota Probolinggo yang menghubungkan Kota-Kota Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo dan Banyuwangi di sebelah Timur, dan Kota-Kota Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya di sebelah Barat. Banyaknya fasilitas hotel dan penginapan menunjukkan perkembangan kegiatan perekonomian pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

**Tabel 2.47 Jumlah Fasilitas Hotel dan Akomodasi lainnya di Kota Probolinggo
Tahun 2012 - 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2014	2015	2016
1	Hotel dan akomodasi lainnya	17	19	21*

Sumber : BPS Kota Probolinggo

*= data estimasi Bappeda Litbang

5. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran dan rumah makan di suatu daerah dapat mendorong dan memberi insentif bagi tumbuhnya daya tarik investasi di daerah tersebut. Banyaknya restoran dan rumah makan juga menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Bagi kehidupan kota, tumbuhnya usaha restoran dan rumah makan juga menunjukkan bahwa dinamika perekonomian

kota sangat kondusif bagi upaya menunjang tumbuhnya daya saing daerah. Gambaran mengenai keadaan restoran dan rumah makan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48 Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2016

NO	URAIAN	JUMLAH			
		2013	2014	2015	2016
1	Jenis Usaha Restoran / Rumah Makan	16	17	21	23*

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2016

*= data estimasi Bappeda Litbang

6. Fasilitas Air Bersih dan Listrik

Ketersediaan air bersih dan listrik bagi kehidupan warga masyarakat dan kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif bagi upaya pengembangan daya saing daerah. Gambaran mengenai ketersediaan air bersih di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kapasitas air bersih yang dapat disediakan secara keseluruhan (Produksi Air)	6.129.500	5.880.500	5.921.800	5.833.900	6.047.400
2	Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih	17.042	17.630	17.833	18.021	18.252
3	Persentase air bersih yang tersalurkan kepada pelanggan	69,55%	76,12%	75,29%	75,72%	76,03%
4	Persentase RT yang telah mendapat aliran listrik	99,26%	99,27%	99,28%	99,30%	99,30%*

Sumber : Dinas Kesehatan dan PLN

*= data estimasi Bappeda Litbang

2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti kondisi keamanan dan politik daerah, kemudahan pelayanan perijinan investasi, adanya peraturan daerah yang menunjang investasi daerah, adanya beban pajak dan retribusi daerah.

Gambaran kondisi iklim berinvestasi di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai indikator sebagai berikut:

1. Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri

Masuknya investasi, baik itu Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri. Stabilitas kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu daerah, adalah merupakan modal penting dalam menarik minat investasi.

Data yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan politik dalam negeri tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.50 Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus-kasus kriminalitas yang terjadi	336	435	1.114	1.707	1.707*
2	Angka kriminalitas	459	168	284	323	323*
3	Jumlah kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa	9	7	8	7	7*
4	Jumlah kasus mogok kerja	Izin mogok kerja dari Disnaker				

*: angka sementara

2. Kondisi Pelayanan Perijinan Investasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat bergantung pada berbagai insentif yang diberikan, antara lain dalam bentuk kemudahan pelayanan perijinan investasi. Semakin banyak insentif yang diberikan akan mendorong minat investor dalam menanamkan modalnya, dan sebaliknya sulitnya pengurusan ijin investasi akan mengurangi minat investasi ke suatu daerah.

Gambaran mengenai pelayanan perijinan investasi di Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.51 Data Pelayanan Perijinan Investasi Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	388	426	451	340	328
2	Surat Keterangan Rencana Kota	72	317	0	0	-
3	Persetujuan Prinsip / Ijin Lokasi	47	40	43	48	64
4	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	706	757	828	715	638
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	745	649	785	713	700
6	Ijin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI)	5	3	8	1	5
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	8	1	6	16	11
8	Ijin Gangguan (HO)	234	285	225	317	272
9	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	278	188	219	121	96
10	Ijin Usaha Pariwisata (IUP)	77	17	4	68	98

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016
11	Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah	92	88	129	129	130
12	Ijin Penutupan Sebagian Badan Jalan	0	0	0	0	-
13	Ijin Penempatan Bedak	108	61	33	67	409
14	Ijin Reklame	419	475	447	258	659
15	Ijin Hiburan	76	66	28	54	38
16	Ijin Usaha Perikanan	3	2	5	4	3
17	Surat Penangkapan Ikan	8	18	12	8	0
18	Surat Pengolahan Ikan	-	1	5	2	5
19	Ijin Pemakaman	318	431	306	305	275
20	Ijin Undian Gratis Berhadiah	2	2	0	0	0
21	Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)	27	18	4	0	-

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

3. Peraturan Daerah Penunjang Investasi

Peraturan Daerah adalah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang bersifat formal. Melalui peraturan daerah dapat diketahui adanya insentif ataupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Peraturan daerah yang mendukung iklim investasi di daerah adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.

Gambaran mengenai adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52 Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

NO	TAHUN	KLASIFIKASI PERDA		
		TERKAIT PERIJINAN	TERKAIT LALU LINTAS BARANG DAN JASA	TERKAIT KETENAGA KERJAAN
1	2012	1. Perda No. 3 Thn 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi 2. Perda No. 5 Thn 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemdondokan 3. Perda No. 6 Thn 2012 tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Perda No. 10 Thn 2012 tentang Perubahan Perda No. 5 Tahun 2009 tentang penyertaan Modal Saham Pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	-
2	2013	Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan terbatas BPR Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi	-

NO	TAHUN	KLASIFIKASI PERDA		
		TERKAIT PERIJINAN	TERKAIT LALU LINTAS BARANG DAN JASA	TERKAIT KETENAGA KERJAAN
3	2014	Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu	Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada BPR Jatim	-
4	2015	1. Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 2. Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perda No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	1. Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 2. Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan.	-
5	2016	-	-	-
Jumlah		7	5	-

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2016

2.2.1. Urusan Wajib

2.2.1.1. Urusan Pendidikan

Sesuai dengan Misi dalam RPJMD Tahun 2014 - 2019 yaitu “Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing,” dan Tujuan “Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; mampu berkarya produktif dan kompetitif; memiliki ketahanan sosial”, serta Sasaran “Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”, maka penyelenggaraan Urusan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mampu membangun dirinya dan masyarakat untuk menjadi sumber daya utama pembangunan.

Urusan Pendidikan dalam tahun 2016 diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dengan anggaran Belanja sebesar Rp. 291.384.615.564,50. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program pembangunan, terdiri dari :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Pendidikan Luar Biasa
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- h. Program Wawasan Wiyata Mandala

Realisasi penyerapan belanja sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 244.289.440.417,00 atau 83,84% dari anggaran yang tersedia. Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.53 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	APK PAUD usia 3-6 tahun	80.21	80.36	73.24	91.14%	berdasarkan data jumlah murid yang bersekolah pada Jenjang TK/RA pada tahun 2016 sebesar 7330 siswa, lebih kecil dibanding tahun 2015 sebesar 8464, hal ini disebabkan angka siswa yang bersekolah di RA mengalami penurunan dari 2751 siswa (thn 2015) menjadi 1458 (thn 2016)
2	Angka Melek Huruf	95.73	96.43	95.04	98.56%	berdasarkan hasil pendataan Buta Aksara Thn 2016, Jumlah buta aksara usia 15 tahun ke atas sejumlah 8658 orang, dan data penduduk usia 15 thn keatas sejumlah 174.672 orang
3	APK SD/MI/Paket A	111.14	111.24	109.05	98.03%	Berdasarkan data jumlah murid yang bersekolah pada Jenjang SD/MI berjumlah 20507 siswa, angka ini menurun dibanding pada tahun 2015 sebesar 20799, dan sebagai pembagiannya adalah jumlah penduduk usia 7 - 12 thn pada tahun 2016 sejumlah 22596 jiwa lebih meningkat dibanding tahun 2015 sejumlah 22016 jiwa

4	APK SMP/MTs/Paket B	124.11	124.26	122.57	98.64%	Berdasarkan data jumlah siswa jenjang SMP/MTs thn 2016 sejumlah 10647 siswa, sedangkan thn 2015 sejumlah 10962 siswa, dan sebagai pembagiannya adalah jumlah penduduk usia 13-15 thn pada thn 2016 sejumlah 11188 jiwa, lebih besar dibandingkan tahun 2015 sejumlah 11056 jiwa
5	APK SMA/MA/SMK / Paket C	123.63	123.78	125.58	101.45%	Berdasarkan data jumlah siswa jenjang SMA/MA/SMK thn 2016 sejumlah 14020 siswa lebih besar dibanding thn 2015 sejumlah 13411 siswa, dan jumlah penduduk usia 16 -18 thn sejumlah 11258 jiwa lebih besar dibanding tahun 2015 sejumlah 10934 jiwa.
6	Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun keatas	9.12	9.27	9.68	104.42%	Jumlah Penduduk usia 15 ke atas yang tamatan SD s.d S3 sejumlah 155.523 jiwa (sumber data : Dispendukcapil). dikalikan dengan lama sekolah dibagi dengan jumlah penduduk tamatan tersebut.
7	Rata-rata nilai US SD/MI minimal 6,5	7.44	6.00	7.00	116.67%	berdasarkan Hasil US SD/MI thn pelajaran 2015/2016
8	Rata-rata nilai UN SMP/MTs minimal 6,5	5.90	6.00	7.23	120.50%	berdasarkan Hasil UN SMP/MTs thn pelajaran 2015/2016
9	Rata-rata nilai UN SMA/MA minimal 7,0	5.70	5.80	7.20	124.14%	berdasarkan Hasil UN SMA/MA thn pelajaran 2015/2016
10	Rata-rata nilai UN SMK minimal 7,0	5.70	5.80	6.90	118.97%	berdasarkan Hasil UN SMK thn pelajaran 2015/2016
11	% lembaga PAUD terakreditasi	81.82	81.97	75.97	92.68%	Berdasarkan data LI Tahun 2016 jumlah PAUD terakreditasi pada tahun 2016 sejumlah 98 lembaga dari 129 lembaga PAUD
12	% SD/MI terakreditasi A	44.68	44.79	47.85	106.83%	berdasarkan data LI Tahun 2016 SD/MI yang terakreditasi A pada tahun 2016 sejumlah 78 lembaga dari 163 SD/MI
13	% SMP/MTs terakreditasi A	42.86	31.07	45.45	146.28%	berdasarkan data LI Tahun 2016 SMP/MTs yang terakreditasi A pada Tahun 2016 sejumlah 20 lembaga

						dari 44 lembaga
14	% SMA terakreditasi A	34.78	30.54	33.33	109.14%	berdasarkan data LI thn 2016 SMA/MA yang terakreditasi A pada tahun 2016 sejumlah 8 lembaga dari 24 lembaga
15	% paket keahlian SMK terakreditasi A	36.84	36.95	35.00	94.72%	berdasarkan data LI tahun 2016 paket keahlian SMK yang terakreditasi A pada tahun 2016 sejumlah 7 lembaga dari 20 lembaga
16	% lembaga yang menerapkan Adiwiyata	40.37	40.52	46.94	115.84%	Jumlah capaian lembaga yang sudah Adiwiyata pada tahun 2016 adalah 26 lembaga, sehingga total sampai dengan 2016 dari 66 lembaga ditambah 26 lembaga menjadi 92 lembaga
17	Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD	55	65	61.35	94.38%	berdasarkan hasil rata-rata nilai UKG seluruh PTK PAUD Tahun 2016
18	Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI	55	65	57.50	88.46%	berdasarkan hasil rata-rata nilai UKG seluruh PTK SD/MI Tahun 2016
19	Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs	55	65	70.40	108.31%	berdasarkan hasil rata-rata nilai UKG seluruh PTK SMP/MTs Tahun 2016
20	Nilai Rerata Kompetensi PTK SMA/MA/SMK	55	65	68.27	105.03%	berdasarkan hasil rata-rata nilai UKG SMA/MA/SMK Tahun 2016
21	% PAUD memenuhi standar	9.75	9.85	29.25	296.97%	berdasarkan data prasarana lembaga yang memenuhi kriteria jumlah Ruang Kelas, Perpustakaan dan UKS yang baik pada Jenjang PAUD yang baik dari 129 lembaga PAUD sejumlah 30 lembaga
22	% SD/MI memenuhi standar	50.31	50.42	63.23	125.41%	berdasarkan data prasarana Dikdasmen lembaga SD/MI yang memenuhi standar sejumlah 89 lembaga dari 141 lembaga
23	% SMP/MTs memenuhi standar	30.69	31.07	44.68	143.80%	berdasarkan data prasarana Dikdasmen lembaga SMP/MTs yang memenuhi standar sejumlah 20 lembaga dari 42 lembaga
24	% SMA/MA memenuhi standar	30.43	30.54	37.50	122.79%	berdasarkan data prasarana Dikdasmen lembaga SMA/MA yang memenuhi standar sejumlah 9

						lembaga dari 24 lembaga
25	% SMK memenuhi standar	26.32	26.47	35.00	132.23%	berdasarkan data prasarana Dikdasmen lembaga SMK yang memenuhi standar sejumlah 7 lembaga dari 20 lembaga
26	% SD/MI memenuhi SPM	83.57	83.72	90.75	108.40%	berdasarkan hasil capaian SPM Pendidikan Dasar Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 lembaga yang memenuhi SPM sejumlah 124 lembaga dari 137 lembaga
27	% SMP/MTs memenuhi SPM	42.86	43.01	76.75	178.45%	berdasarkan hasil capaian SPM Pendidikan Dasar Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 lembaga yang memenuhi SPM sejumlah 34 lembaga dari 44 lembaga

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Beberapa kegiatan Fisik yang berasal dari DAK dan DID Fungsi Pendidikan yang masuk pada Perubahan APBD Bidang Pendidikan pada Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu setelah pengesahan P-APBD 2016.
- b. Tidak maksimalnya penyerapan BOSDA pada lembaga SD, SMP, SMA dan SMK Negeri
- c. Kekurangan tenaga guru kelas jenjang SD, yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah (adanya Moratorium CPNS) selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2014.
- d. Adanya guru yang mengalami sakit fisik dan mental dalam jangka waktu yang lama dan guru yang melakukan tindak indiscipliner.
- e. Kurang maksimalnya Kepala Sekolah dan Guru mengenai pelaksanaan Program Adiwiyata.
- f. Tidak terlaksananya kajian Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- g. Masih belum maksimalnya hasil Rakerda Pendidikan Tahun 2016 untuk diakomodir pada Program dan Kegiatan Tahun 2017.
- h. Masih ada beberapa Indikator Pencapaian SPM Pendidikan Dasar yang belum mencapai target yang telah ditentukan.
- i. Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) yang biasanya dilaksanakan 2 (dua) kali, hanya dilaksanakan 1 (satu) kali.

- j. Belum maksimalnya / belum terpenuhinya sarana prasarana pada lembaga PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
- k. Adanya perubahan jadwal dan lokasi kegiatan skala Provinsi dari Pemprov Jawa Timur

2.2.1.2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan adalah dalam rangka mewujudkan **Misi** “Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing,” dan mencapai **Tujuan** “Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; mampu berkarya produktif dan kompetitif; memiliki ketahanan sosial,” dengan **Sasaran** “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yang terjangkau dan merata” yang diukur menggunakan enam belas indikator kinerja dalam dua fokus pembangunan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014 - 2019.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Mohammad Saleh selaku *leading sector*. Dalam artian, disamping program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD, beberapa SKPD lain juga melaksanakan kegiatan - kegiatan yang bersifat *cross cutting activity*, yaitu kegiatan tersebut berada dalam lingkup tugas masing - masing SKPD bersangkutan tetapi mengandung muatan - muatan program/kegiatan dalam lingkup Urusan Kesehatan. Kebijakan/muatan atas kegiatan - kegiatan tersebut ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan SKPD sebagai pelaksana kegiatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, operasionalisasi penyelenggaraan Urusan Kesehatan oleh;

1. Dinas Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan adalah melalui berbagai program/kegiatan pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya - upaya promotif dan preventif. Adapun program kegiatan yang dilakukan antara lain;

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- f. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

g. Program Upaya Kesehatan Keluarga

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.54 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Purnama Mandiri	17,24%	11%	13,79%	125,36%	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Purnama Mandiri sudah melebihi target dengan empat kelurahan yang berstrata purnama mandiri yakni Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Wiroborang dan Kelurahan Wonoasih. Hal ini didasarkan dari penilaian 8 indikator kelurahan siaga sehat aktif yaitu pembinaan PHBS Rumah Tangga yang sudah >70% dari Rumah Tangga yang ada, adanya Peraturan Lurah yang sudah direalisasikan, ada peran aktif masyarakat & Ormas dengan minimal 2 ormas (NU, Muhammadiyah, remaja gereja), Posyandu Balita Aktif & Tiga UKBM lainnya juga aktif (posyandu lansia, Forkessa, Posbindu), Kemudahan akses pelayanan kesehatan (pustu), Kader Kelurahan berjumlah 15 dan Forum Masyarakat Kelurahan sudah berjalan setiap bulan
2	Angka Kematian Ibu	81,54/ 100.000 KH	97,19/ 100.000 KH	6 kasus	163,132/ 100.000 KH	Masih banyak ibu hamil dengan resiko tinggi, kurangnya pengetahuan ibu tentang resiko tinggi, kurangnya pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan
3	Angka Kematian Bayi	23,37/ 1.000 KH	25,61/ 1.000 KH	98 kasus	26,64/ 1.000 KH	Kelahiran bayi dengan resiko tinggi masih tinggi, keterlambatan dalam penanganan kasus, kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan resiko tinggi sehingga banyak kelahiran dengan BBLR
4	Prevalensi Gizi Buruk	1,1%	2,0 %	145/ 10.397	1%	Intensifikasi program perbaikan gizi masyarakat
5	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	-	2 Puskes mas (33%)	0%	0%	Karena adanya keterbatasan jumlah Tim Surveyer Pusat sehingga jadwal Survey Akreditasi Puskesmas Kota Probolinggo di Reschedule pada bulan Juli 2017
6	Persentase Penanganan Penyakit Menular :					
	- TB BTA +	61% (150 kasus)	85%	119,43% (424 kasus)	119,43%	Sering dilakukan penyuluhan oleh petugas kesehatan, kunjungan aktif ke rumah penderita TB untuk mencari kemungkinan penderita baru di dalam satu keluarga tersebut, Sosialisasi TB kepada kader posyandu dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesehatan

	- HIV/ AIDS	63%	100%	100%	100%	Kasus yang ditemukan langsung ditangani oleh Rumah Sakit dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Adanya manager kasus yang membantu untuk pendampingan penderita HIV - AIDS
	- DBD	100% (236 kasus)	100%	100% (522 kasus)	100%	Laporan penderita yang diterima langsung dilakukan pelacakan dan fogging oleh petugas dari Dinas Kesehatan dan puskesmas
7	Persentase Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Beresiko Usia >15 tahun secara kumulasi	7,53%	20%	8,31`%	15,84%	Rerata presentase (*) screening kasus baru hipertensi dan obesitas serta deteksi dini kanker leher rahim/ servick dibagi jumlah penduduk >15 th secara kumulatif

Sumber: Dinas Kesehatan

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Keterlambatan pembahasan P-APBD sehingga jangka waktu pelaksanaan P-APBD terlalu singkat
- b. Terbatasnya ketersediaan obat di e-catalog sehingga proses pengadaan obat harus diproses ulang melalui proses lelang di Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kota Probolinggo.
- c. Semakin banyaknya penduduk yang mengikuti kepesertaan BPJS sehingga alokasi dan penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kapitasi mengalami penurunan

2. RSUD Dr. Moh Saleh

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan oleh RSUD lebih diarahkan rehabilitatif dan kuratif. Adapun program pembangunan yang dilaksanakan, meliputi :

- a. Penyediaan dan Perbekalan Obat
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Promosi Kesehatan & Pemberdaya an Masyarakat
- d. Program pengembangan Lingkungan Sehat
- e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- f. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS
- g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
- h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- i. Pemenuhan Pelayanan dasar dan jaminan Sosial
- j. Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Dr Moh Saleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.55 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD Dr MOH. SALEH TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	76.75%	>80%	74.40%	93%	target tercapai
2	Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	-	-	tidak ada pengaduan dari masyarakat
3	Prosentase capaian Indikator SPM yang memenuhi target	70.51%	100%	63.92%	63.92%	masih banyak indikator SPM yang belum terpenuhi
4	Pemanfaatan / pemakaian tempat tidur (BOR)	74.20%	69%	72.89%	105.64%	target tercapai terkait jumlah kunjungan meningkat
5	Rata - Rata hari rawatan pasien / Averagre Length of Stay (ALOS)	4.1	4	4.29	107.25%	target tercapai terkait jumlah kunjungan meningkat
6	Frekuensi pemakaian tempat tidur/ Bed Turn Over (BTO)	71.55	50	74.14	148.28%	target tercapai terkait jumlah kunjungan meningkat
7	Turn Over Internal (TOI)	1.73	2	1.54	76%	sudah sesuai target rata-rata hari tempat tidur (TT) ditempati
8	Net Date Rate (NDR)	24.12	23	28.16	122.43%	target tercapai terkait peningkatan mutu pelayanan RS
9	Prosentase tenaga medis, paramedis & non medis di RS yg terlatih	66%	72%	42%	58.33%	Masih adanya tenaga di unit khusus yang belum mengikuti pelatihan dikarenakan belum adanya jawaban atau menunggu jadwal pelatihan dari instansi pelatihan terkait.
10	Prosentase jumlah tenaga medis, paramedis dan non medis sesuai standar RSUD BLUD Tipe B Non Pendidikan	88.58%	100%	94%	94%	Masih belum terpenuhinya tenaga medis sub spesialis di RS
11	Cost Recovery Ratio (CRR)	91.15%	91.16%	95.45%	104.71%	target tercapai
12	Prosentase Tindaklanjut temuan pengelolaan keuangan oleh auditor	100%	100%	66.70%	66.70%	dikarenakan tindaklanjut temuan persediaan farmasi belum diterima oleh BPK

Sumber : RSUD dr. M. Saleh Kota Probolinggo

2.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum tahun 2015 adalah dalam rangka mewujudkan amanat dalam RPJMD tahun 2014 - 2019, yaitu Misi "Mewujudkan iklim investasi yang Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Yang Berkelanjutan”, Tujuan “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar”, dan mencapai dua Sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur strategis dan ramah lingkungan bagi optimalisasi aktivitas perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat kota.
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kota.

Untuk mencapai Sasaran tersebut di atas, khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 dialokasikan anggaran Belanja sebesar Rp. 108.002.540.992,80 dan realisasi penyerapannya berjumlah Rp. 57.815.471.014,00 atau 53,53% digunakan untuk melaksanakan program – program sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan
- f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- k. Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama
- l. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- m. Program Pengawasan Jasa Kontruksi
- n. Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan
- o. Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan
- p. Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan
- q. Program pengawasan Pembngunan Gedung Dan Lingkungan
- r. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik
- s. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- t. Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2016 pengukurannya terinci seperti pada Tabel berikut;

**Tabel 2.56 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016**

INDIKATOR	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	KETERANGAN
Persentase saluran irigasi, sungai, drainase dalam kondisi mantap	75%	77%	76%	98,70%	untuk mendapatkan kondisi dimana tidak terdapat endapan sedimen yang tinggi, tidak terdapat banyak gulma, bersih dari sampah, dan plengsengan tidak rusak lebih dari

					60% serta tidak kehilangan air yang melebihi 10% dari debit air
Persentase kondisi fasilitas umum penunjang perekonomian Kota Probolinggo yang nyaman dan aman	74%	79%	74%	93,67%	untuk mendapatkan kondisi fasum pasar yang ada di kota probolinggo yang nyaman dimana terdapat fasilitas seperti kamar mandi dan WC, sarana persampahan dan kebakaran, dan ruang untuk parking serta aman dimana terdapat fasilitas seperti bedak yang permanen dimana sudah di sekat tembok dan ada penutup bedak dan juga terdapat fasilitas pos jaga satpam
Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	78%	84%	83%	98,81%	untuk mendapatkan kondisi panjang Jalan dalam Kondisi mantap adalah kondisi dimana kondisi jalan dengan tingkat kerusakan tidak lebih dari 60% dan tingkat kerusakan jalan tidak ada lubang dengan kedalaman lebih dari 20 cm

Sumber : Dinas PU Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- Penyerapan pada Kegiatan rutin pada UPT Jasa Konstruksi tidak terlaksana maksimal karena kurang optimalnya pemanfaatan alat lab jasa konstruksi karena rekomendasi BPK lebih mengarah kepada pihak independen.
- Terdapat beberapa paket Gagal Lelang karena ada beberapa aspek yang tidak memenuhi pada saat di lelangkan
- Terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tetapi gagal untuk dilaksanakan contohnya seperti pada kegiatan budaya kerja
- Terdapat permasalahan hanya pada kurangnya penyerapan anggaran akan tetapi pelaksanaan sudah direalisasikan dengan baik hanya ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena kurangnya waktu pelaksanaan.

2.2.1.4. Urusan Perumahan

Dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 penyelenggaraan Urusan Perumahan mengacu pada **Misi** "Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan", **Tujuan** "Meningkatkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kota". **Sasaran** "Terwujudnya lingkungan permukiman kota yang semakin bersih, sehat, tertata, rapi dan indah." Oleh karena itu pembangunan Urusan Perumahan tahun 2016 di Kota Probolinggo diarahkan untuk peningkatan kualitas permukiman masyarakat, dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui perbaikan permukiman (pemugaran perumahan, plesterisasi, cakupan penyediaan air bersih, penyediaan sanitasi skala permukiman) dan lingkungan sehat perumahan.

Dinas Pekerjaan Umum selaku penyelenggara Urusan Perumahan pada tahun 2016 memperoleh anggaran Belanja sebesar Rp. 14.105.708.365,00 untuk melaksanakan program pembangunan berikut :

- a. Program Pengembangan Perumahan;
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 12.009.045.200,00 atau 85,14% dari anggaran yang ditetapkan. Capaian kinerja Urusan Perumahan pada tahun 2016 pengukurannya terinci seperti pada Tabel berikut;

**Tabel 2.57 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PERUMAHAN TAHUN 2016**

INDIKATOR	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	KETERANGAN
Persentase saluran irigasi, sungai, drainase dalam kondisi mantap	75%	77%	76%	98,70%	untuk mendapatkan kondisi dimana tidak terdapat endapan sedimen yang tinggi, tidak terdapat banyak gulma, bersih dari sampah, dan plengsengan tidak rusak lebih dari 60% serta tidak kehilangan air yang melebihi 10% dari debit air

Sumber : Dinas PU Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Pelaksanaan pada kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan tidak jadi terealisasi karena untuk pembentukan tim tidak terlaksana dan pendataan tidak dilaksanakan karena kurangnya waktu pelaksanaan pada PAK 2016.
- b. Pelaksanaan kegiatan untuk beberapa paket kegiatan contohnya pembuatan pondasi untuk rusunawa baru tidak terealisasi karena ada terkendala di lapangan dan kurangnya waktu pelaksanaan.
- c. Penyerapan Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Pelaksanaan tidak terealisasi karena SILPA DAK untuk penentuan hibah masih terkendala lokasi, waktu pelaksanaan dan badan hukum.

2.2.1.5. Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan/pembangunan Urusan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian Misi “Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan”, Tujuan “Meningkatkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kota”. Sasaran “Terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan lahan perkotaan guna kenyamanan kehidupan kota.” ehubungan dengan itu, penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan agar pemanfaatan ruang/wilayah Kota Probolinggo dapat berlangsung secara berkelanjutan, dalam artian terjadi harmonisasi pemanfaatan tata ruang dalam mengakomodasi kebutuhanberbagai aspek pembangunan dan terjaganya keberlanjutan daya dukung tata ruang.

Untuk tahun 2016, anggaran Belanja Langsung untuk penyelenggaraan urusan ini sebesar Rp. 1.580.083.190,00 untuk melaksanakan program - program pembangunan meliputi :

- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
- b. Program Pemanfaatan Ruang;
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.508.834.400,00 atau 95,49% dari nilai anggaran yang ditetapkan. Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2016 pengukurannya terinci seperti pada Tabel berikut;

**Tabel 2.58 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016**

INDIKATOR	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	KETERANGAN
Prosentase Bangunan yang sesuai Prinsip Kaidah Bangunan	78%	82%	81%	98,78%	Meningkatkan ketertiban pembangunan dan pemanfaatan gedung dengan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dengan Pemetaan Ruang dan Pembangunan Bangunan yang lebih intens di Kota Probolinggo

Sumber : Dinas PU Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala yaitu, pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tidak optimal karena sosialisasi untuk kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang belum terlaksana sepenuhnya.

2.2.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kota Probolinggo adalah dalam rangka mencapai Misi “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik,” Tujuan “Meningkatkan bobot keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan intensitas informasi program-program pembangunan bagi masyarakat” yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2014 - 2019.

Kinerja penyelenggaraan urusan ini pengukurannya menggunakan empat indikator kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD (Fokus Pelayanan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan). Dan, untuk mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2016 disediakan anggaran Belanja sebesar Rp. 13.288.827.743,30 bagi Bappeda selaku *leading sector*, dalam artian kegiatan - kegiatan perencanaan pembangunan juga dilaksanakan oleh unit kerja - unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di bawah koordinasi Bappeda Kota Probolinggo.

Program - program pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 terdiri dari:

- a. Program Pengembangan Data/ Informasi
- b. Program Kerjasama Pembangunan
- c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- f. Program Perencanaan Sosial Budaya
- g. Program Kajian Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah
- h. Program Pengembangan Penelitian/ Kajian Masyarakat
- i. Program Pengembangan Kelembagaan Penelitian Daerah

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.59 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	K E T E R A N G A N
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase keselarasan antara RKPD dan RPJMD		90%	71.78%	79.76%	Masih banyaknya SKPD yang pada penyusunan renja tidak menyelaraskan antara dokumen perencanaan lainnya seperti PPJP dan RPJMD
2	Persentase Renstra SKPD Yang baik		90%	100%	111%	SKPD Telah mendapat pelatihan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Renstra
3	Persentase Renja SKPD yang selaras dengan RKPD		100%	100%	100%	
4	Persentase dokumen perencanaan SKPD yang disampaikan tepat waktu					
	- Dokumen Renstra SKPD		90%	85%	94.4%	Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan renstranya tepat waktu
	- Dokumen Renja SKPD		90%	85%	94.4%	Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Renjanya tepat waktu

Sumber : Bappeda Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a) Efisiensi Anggaran disesuaikan dengan harga pasar

- b) Penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan revisi RPJMD dan disaat anggaran ini disediakan belum ada revisi RPJMD. Sehingga revisi Renstra belum dilaksanakan
- c) Keterlambatan Pengumpulan Laporan Kontrak Kinerja dan Pengukuran Kinerja dari SKPD sehingga Anggaran Cetak tidak terserap dikarenakan Batas Maksimal Penyerapan Anggaran
- d) Adanya kekosongan lomba Inovasi Daerah dari pihak Penyelenggara (otonomi Award Dan Imp Award) Maka Anggaran dialihkan pada kegiatan Seminar Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.2.1.7. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah dalam rangka mewujudkan Misi “Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan”, dan Tujuan “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar” sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2014 - 2019. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur strategis dan ramah lingkungan bagi optimalisasi aktivitas perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat kota;
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kota.

Untuk mencapai Sasaran tersebut, Dinas Perhubungan selaku penyelenggara urusan ini memperoleh alokasi anggaran Belanja berjumlah Rp. 18.403.921.023,00 dan realisasinya sebesar Rp. 16.692.199.649,00 atau 90,70% untuk melaksanakan program, yaitu :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- f. Program Kelaikkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- g. Program Perlengkapan dan Keselamatan Jalan

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Perhubungan diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.60 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
----	-------------------------	----------------	-------------	----------------	---------	------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	78.06	78	78.32	100.41%	target tercapai dikarenakan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi sudah dinilai baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi.
2	Prosentase Angkutan Kota yang Memiliki Ijin Trayek	87.75%	86%	92.65%	107.73%	target tercapai dikarenakan Meningkatnya Angkutan Kota yang memperpanjang ijin trayek dibandingkan tahun kemarin.
3	Prosentase Panjang Jalan di Kota Probolinggo yang Memiliki Fasilitas Perlengkapan Jalan (sesuai UU No. 22 Tahun 2009)	40.68%	40%	40.68%	101.70%	Belum adanya penambahan panjang jalan di Kota Probolinggo sehingga realisasi tidak mengalami capaian yang signifikan dibanding tahun kemarin.
4	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Kota Probolinggo	43.30%	-10%	-41.99%	419.98%	target belum tercapai akan tetapi sudah mengalami penurunan pada jumlah pelanggaran lalu lintas jalan pada tahun 2016 sebanyak 6.545 kasus pelanggaran.
5	Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Probolinggo	24.36%	-13%	3.09%	-23.77%	Capaian mengalami penurunan hal ini disebabkan kurangnya kehati-hatian pengguna jalan dalam berlalu lintas serta terburu-buru dalam berkendara.
6	Prosentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan (sesuai UU No. 22 Tahun 2009)	90.11%	82%	82.39%	100.48%	telah mencapai target akan tetapi jumlah angkutan jalan yang melakukan uji kir mengalami penurunan dari tahun kemarin dikarenakan regulasi yang semakin ketat.
7	Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	81.67%	82%	81.67%	99.59%	Capaian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran para pemilik kapal tentang keselamatan di laut.
8	Prosentase Prasarana Transportasi (Terminal, Shelter, Pengujian Kendaraan Bermotor) yang Berfungsi dengan Baik	88.46%	89%	92.31%	103.72%	target tercapai dikarenakan adanya perbaikan shelter/halte pada Tahun 2016 sebanyak 11 unit.

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

2.2.1.8. Urusan Lingkungan Hidup

Aktivitas pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2014 - 2015 adalah pencapaian Misi “Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan”, Tujuan “Meningkatkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kota”, dengan Sasaran “Terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan

lahan perkotaan guna kenyamanan kehidupan kota.” yang pengukuran kinerjanya menggunakan enam indikator kinerja.

Leading sector penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Untuk tahun anggaran 2016 memperoleh alokasi Belanja sebesar Rp. 34.407.632.625,40 dan realisasi penyerapan belanja sampai dengan 31 Desember 2016 berjumlah Rp. 31.553.139.713,05 atau 91,70% dari anggaran. Dana APBD tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program pembangunan, yaitu :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- g. Program Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum
- h. Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota Pertamanan dan Pemakaman
- i. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- j. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.61 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)	44.86	48	43.91	91.48	Volume sampah yang didaur ulang oleh pengepul berkurang (tahun 2016 tidak menerima sampah yang akan diolah dari luar kota probolinggo)
2	Ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan (%)	34.44	32	34.45	107.66	Penentuan target di Renstra terlalu kecil dan akan disikapi dengan mereviu Renstra
3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	1.59	2	1.71	85.50	Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembakaran sampah
4	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	66	68	61.29	90.13	masih kurangnya kesadaran penanggungjawab kegiatan/usaha akan pengelolaan limbah cair
5	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	50	50	100	200.00	semua kegiatan/usaha yang mempunyai cerobong asap telah taat aturan

6	Pelayanan Informasi status kerusakan lahan, tanah karena produksi biomassa (%)	50	49	70	142.86	Penentuan target di Renstra terlalu kecil dan akan disikapi dengan mereviu Renstra
7	Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran & kerusakan lingkungan (%)	100	100	100	100.00	
8	Luasan RTH Publik Kota (%)	7.35	7.85	7.35	93.63	Tidak terdapat pengadaan taman/RTH pada tahun 2016

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat/penanggung jawab kegiatan usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada limbah yang dihasilkan tidak memenuhi baku mutu
- b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan pengolahan serta pendaurulangan sampah. Salah satu dampaknya adalah masih tingginya angka pembakaran sampah yang dapat meningkatkan efek rumah kaca

2.2.1.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mendukung pencapaian Misi “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik”, Tujuan “Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pelayanan, pengaturan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat”, dan Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.”

Untuk tahun anggaran 2016 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh anggaran Belanja sebesar Rp. 5.874.087.557,00 seluruhnya dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.177.398.030,00 atau 88,14%.

Adapun program pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 meliputi :

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- b. Program Penataan Administrasi Catatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.62 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Penduduk ber-KTP (KTP-el) persatuan penduduk (%)	88.49%	92.86%	93.51%	97.67%	Masyarakat semakin paham akan pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi kependudukan
2	% Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100%	89.33%	100%	119.05%	Masyarakat semakin paham akan pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi kependudukan
3	Rasio bayi berakta kelahiran (%)	82.10%	83.00%	85.17%	102.62%	
4	% penduduk yang memiliki akta kelahiran	64.69%	72.00%	65.97%	91.11%	Untuk warga yang lanjut usia kurang memahami pentingnya dokumen akta kelahiran sehingga tidak mau mengurus akta kelahiran
5	% penduduk meninggal yang mengurus akta kematian	15.49%	30.00%	55.17%	91.12%	
6	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota probolinggo	80.4	81.3	82.53	101.51	Pelayanan petugas terhadap masyarakat semakin baik dan meningkat

Sumber : Dispendukcapil Kota Probolinggo (diolah) ;

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala, yaitu warga yang lanjut usia kurang memahami pentingnya dokumen akta kelahiran sehingga tidak mau mengurus akta kelahiran

2.2.1.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan utama dari pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam Urusan ini adalah mewujudkan kesetaraan/keadilan gender serta terhapusnya segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dikaitkan dengan RPJMD tahun 2014 - 2019, penyelenggaraan urusan ini oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Probolinggo sebagai *leading sector* adalah untuk mencapai Misi "Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing", Tujuan "Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo : menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berkarya produktif dan kompetitif, memiliki ketahanan sosial", dengan Sasaran "Meningkatnya kemandirian

masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia, dan semakin kokohnya ketahanan keluarga sebagai basis terwujudnya ketahanan sosial .”

Untuk tahun anggaran 2016, jumlah Belanja yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan ini Realisasi penggunaan definitif sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berjumlah Rp 7.561.741.683,00 atau 93,29% dari anggarannya yang dipergunakan untuk melaksanakan program - program pembangunan berikut :

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.63 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	44.46%	46.00%	48.04%	104.43%	Jml tenaga kerja perempuan naik dari th 2015
2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	93,33% (42 Kasus)	80% (36 Kasus)	51,1% (23 kasus)	63.89%	Jumlah Kasus kekerasan thd perempuan dan anak menurun dr th 2015
3	Persentase pengaduan kasus KDRT, non KDRT dan <i>trafficking</i> yang diselesaikan oleh pusat pelayanan terpadu	100%	100%	100% (23 Kasus)	100% (23 Kasus)	Seluruh Kasus yang masuk PPT tertangani dan diselesaikan

Sumber : BPPKB Kota Probolinggo (diolah) ;

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

1. Masih banyaknya kasus-kasus KDRT dan tindak kekerasan lainnya di lingkungan masyarakat baik terhadap perempuan dan anak
2. Kurang optimalnya pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak korban kekerasan dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga pengelola/ pelaksana, sarana prasarana yang kurang memadai serta kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Masih terdapat beberapa SKPD dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan belum melaksanakan perencanaan penganggaran yang responsif gender.

2.2.1.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan lingkup aktivitasnya, penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS) adalah mendukung pencapaian Misi “Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing”, Tujuan “Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo: menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berkarya produktif dan kompetitif, memiliki ketahanan sosial”, dengan Sasaran “Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia, dan semakin kokohnya ketahanan keluarga sebagai basis terwujudnya ketahanan sosial .”

Dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 ditetapkan empat indikator kinerja untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan ini oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Probolinggo. Untuk itu, pada tahun 2016 BPPKB memperoleh anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.029.090.700,00 dan realisasi pengeluaran definitif sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.623.317.523,00 atau 80% dari alokasi anggarannya. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program pembangunan, yaitu:

- a. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
- b. Program Keluarga Berencana
- c. Program pelayanan kontrasepsi;
- d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.64 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pasangan usia subur yang mengikuti program KB	75.0%	74.0%	78.30%	105.81%	Total peserta KB Aktif dibanding Pasangan Usia Subur

Sumber : BPPKB Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap keberadaan kelompok-kelompok kegiatan seperti BKB, BKR dan BKL.
- b. Keterbatasan jumlah kader pengelola dan pelaksana kelompok kegiatan, sehingga banyak kelompok kegiatan yang kurang aktif.

- c. Dukungan oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama semakin menurun dalam pelaksanaan program KB di tingkat Desa/Kelurahan.
- d. Masih tingginya pernikahan usia dini di masyarakat.
- e. Masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya metode Medis Operasi utamanya Medis Operasi Pria (MOP).

2.2.1.12. Urusan Sosial

Sesuai dengan RPJMD 2014 - 2019 penyelenggaraan Urusan Sosial berkaitan dengan pencapaian Misi “Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal”, Tujuan “Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bingkai kearifan lokal,” dengan Sasaran “Terlaksanakannya pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial” dan “Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetia-kawanan sosial.”

Jumlah anggaran Belanja yang disediakan dalam APBD tahun 2016 seluruhnya sebesar Rp 10.898.452.243,60 dan realisasinya berjumlah Rp 8.786.779.160,00 atau 80,62%. Program - program pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun 2016, meliputi :

- a. Program Pemberdayaan Fakmis, KAT, PMKS lainnya
- b. Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
- f. Program Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan
- g. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar & Jaminan Sosial
- h. Program Pembinaan ketrampilan bagi masyarakat di lingkungan bahan baku tembakau

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Sosial diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.65 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN SOSIAL TAHUN 2016**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase penyandang Disabilitas yang berhasil hidup mandiri	5.05%	12.99%	11.00%	84.71%	Dana APBD yang ada sudah sesuai dengan target yg diinginkan sehingga bisa terealisasi semua.

2	Prosentase Anak jalanan yang berhasil Hidup mandiri	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	RKA Tahun 2016 Kurang sempurna karena tidak ada Transport/Uang saku untuk peserta pelatihan, sehingga dianggarkan di PAK, namun antara waktu PAK dan penutupan anggaran terlalu dekat sehingga waktu tidak mencukupi untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut.
3	Presentase lansia yang terpenuhi kebutuhan dasar	24.83%	21.11%	21.11%	100.00%	Tidak memenuhi target karena setelah diverifikasi ada warga yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan yaitu 1 meninggal dunia
4	Prosentase Warga miskin yang terpenuhi Kebutuhan Dasar	10.53%	16.02%	16.02%	100.00%	Tidak memenuhi target karena setelah diverifikasi banyak warga yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan seperti meninggal dunia, pindah ke luar kota, warga sudah mampu/kaya.
5	Presentase ODHA yang produktif	18.52%	92.59%	92.59%	100.00%	Dana APBD yang ada sudah sesuai dengan target yg diinginkan sehingga bisa terealisasi semua.
6	Presentase Anak Bermasalah dengan Hukum yang terlindungi haknya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dana APBD yang ada sudah sesuai dengan target yg diinginkan sehingga bisa terealisasi semua.
7	Persentase Anak terlantar yang terlindungi hak dasar hidupnya	13.02%	65.10%	62.50%	96.00%	Target yang ingin dicapai 250 Orang namun setelah diverifikasi ada 10 Orang yang tidak memenuhi syarat seperti Proposal tidak lengkap, Pindah ke luar kota dll
8	Presentase Gelandangan /Pengemis /Eks Psikotik/Tuna Sosial yang mengalami perubahan perilaku	14.74%	42.11%	42.11%	100.00%	Dana APBD yang ada sudah sesuai dengan target yg diinginkan sehingga bisa terealisasi semua.
9	Presentase Rumah yang layak huni	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinsos mengusulkan 35 Rumah ke Kementrian disetujui dan ditambah 15 jadi 50 Rumah, dana tersalurkan semua ke masing-masing penerima.
10	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dana APBD yang ada sudah sesuai dengan target yg diinginkan sehingga bisa terealisasi semua.
11	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dana APBD yang ada sudah sesuai dengan target yg diinginkan sehingga bisa terealisasi semua.

12	Persentase Taruna Siaga Bencana yang dibina dan aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dana APBD yang ada sudah sesuai dengan target yg diinginkan sehingga bisa terealisasi semua.
13	Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	71 KUBE	35 KUBE	35 KUBE	35 KUBE	Dinsos mengusulkan 50 KUBE ke Kementerian tetapi hanya di setujui 35 KUBE, dana tersalurkan semua ke masing-masing penerima.

Sumber : Dinas Sosial Kota Probolinggo (diolah)

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Setelah di Verifikasi dan Validasi banyak warga yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan seperti meninggal dunia, pindah ke luar kota, perbedaan nama, kurangnya kelengkapan Proposal.
- b. RKA Tahun 2016 Kurang sempurna karena tidak ada Transport/Uang saku untuk peserta pelatihan, sehingga dianggarkan di PAK, namun antara waktu PAK dan penutupan anggaran terlalu dekat sehingga waktu tidak mencukupi untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut (Pelatihan Keterampilan untuk Anak Jalanan).
- c. Pada saat perencanaan Anggaran terdapat kesalahan kode rekening pada pengadaan seragam untuk Karang Taruna sehingga anggaran tidak terserap, dan tidak terlaksananya pembinaan Karang Wredha.
- d. Pada saat perubahan anggaran, anggaran dialihkan ke kegiatan yang lain dikarenakan calon penerima bantuan yaitu organisasi tersebut tidak berbadan hukum sehingga tidak bisa mencairkan bantuan.
- e. Dalam kegiatan Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial bagi Lansia bantuan hanya berupa biaya perjalanan ke UPT atau Kota Asal yang bersangkutan dan Lansia yang diantar berdasar data yang masuk ke Dinas Sosial.
- f. Karena Organisasi yang akan diberi bantuan tidak berbadan hukum.
- g. SKPD hanya menganggarkan bantuan nutrisi dan peralatan untuk Anak Berkebutuhan Khusus, tidak merealisasi bantuan sarana/Prasarana karena menurut kepala SKPD sudah di tangani oleh Dinas Pendidikan.
- h. Karena Proposal belum dicukupi dan sebagian korban Tindak Kekerasan rujuk dengan pasangannya, sehingga tidak diberikan bantuan.

2.2.1.13. Urusan Ketenagakerjaan

RPJMD tahun 2014 – 2019 mengamanatkan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo adalah dalam rangka mencapai Misi “Membangun

Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan”, Tujuan “Mengembangkan usaha penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara berkeadilan (*pro poor dan pro job*).” Sedangkan Sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 adalah “Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka menurunkan angka pengangguran”.

Dengan tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha seiring dengan adanya investasi, pada gilirannya diharapkan menjadi salah satu pengungkit dari berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan, dalam artian tenaga kerja yang terserap jumlahnya signifikan dan tingkat upah yang diperoleh pekerja cukup untuk hidup layak.

Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo selaku pengampu urusan ini memperoleh alokasi dana APBD tahun 2016 berupa Belanja sebesar Rp 10.031.701.267,00 untuk melaksanakan program – program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- b. Program peningkatan Kesempatan kerja.
- c. Program jejaring kerja sama bidang ketenagakerjaan.
- d. Program pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
- e. Program pengembangan hubungan industrial
- f. Program Pengembangan Kota Sehat
- g. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan produktivitas

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 berjumlah Rp. 8.518.506.405,00 atau 84,92% dari anggaran yang tersedia. Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.66 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan.	72,4%	69,5%	73,9%	106,3%	Karena lowongan yang ada lebih sesuai dengan kompetensi pencari kerja baik disektor formal maupun disektor informal.
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.	71,8%	64,8%	76,3%	117,7%	Jumlah pendaftar peserta pelatihan sebagian besar terakomodir untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi.
3	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	48,7%	45,5%	56,2%	123,5%	Makin meningkatnya kesadaran pengusaha tentang manfaat perlindungan tenaga kerja bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan makin meningkat.
4	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.	81,8%	56,5%	88,8%	157,2%	Makin meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap undang-undang ketenagakerjaan sehingga apabila terjadi perselisihan

						kerja dapat diselesaikan ditingkat perjanjian kerja (BIPARTIT).
5	Persentase perusahaan yang menjalankan sistem manajemen K3.	46,6%	17,8%	44,8%	151,7%	Makin meningkatnya kesejahteraan pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga berpengaruh terhadap menurunnya angka kecelakaan kerja dengan demikian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja makin meningkat.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo

2.2.1.14. Urusan Penanaman Modal

Sesuai dengan RPJMD tahun 2014 - 2019 penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal untuk mendukung pencapaian Misi “Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan”, dengan Tujuan “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah kota yang sangat berarti dan diperlukan bagi pembangunan perekonomian berkualitas”, serta Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kondusifitas iklim usaha dan investasi.”

Realisasi jumlah pengeluaran definitif per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.380.312.614,50 atau 92,19% dari anggaran yang tersedia. Adapun program - program pembangunan penanaman modal yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Penanaman Modal diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 2.67 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah nilai investasi dari PMA, PMDN, Usaha Kecil Menengah	Rp 1,824,377,46 7,566.00	Rp 575,000,00 0,000.00	Rp 740,612,581, 171.00	128.80	Adanya kendala belum selesainya review rencana tata ruang wilayah Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga calon investor yang seharusnya masuk ke Kota Probolinggo menjadi batal atau mengalihkan investasinya ke daerah lain
2	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100.00	Setiap pengaduan yang datang langsung ditindaklanjuti oleh BPMPD melibatkan Tim Teknis/SKPD terkait
3	Skor hasil rata – rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.68	81.25	87.67	107.90	Kemungkinan adanya pemohon izin yang merasa kurang adil dalam mendapatkan pelayanan perizinan.
4	Prosentase izin yang selesai tepat	0.92%	92.00%	90.59%	98.47	Kinerja petugas pada pemroses izin kurang

waktu					komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang baik pada bagian pemroses izin
-------	--	--	--	--	---

Sumber : BPPPM Kota Probolinggo (diolah) ;

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dengan demikian perlu adanya penambahan anggaran sesuai dengan rencana yang telah kita ajukan
- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sehingga perlu adanya penambahan SDM dan Bimtek/Workshop
- c. Kurangnya komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja pelayanan, sehingga perlu adanya motivasi dalam melaksanakan kinerja antara lain melalui kegiatan management trainee, peningkatan kesejahteraan pegawai

2.2.1.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan karena mempunyai potensi besar menjadi salah satu pilar penggerak perekonomian nasional dan daerah, sekaligus dapat menjadi katup pengaman menanggulangi masalah lapangan kerja ataupun gejolak ekonomi makro nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Probolinggo yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 dalam rangka mencapai **Misi** “Mengembangkan sektor riil pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk semua sektor usaha” dan **Tujuan** “Meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupan masyarakat” dengan **Sasaran** “Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi” dan “Meningkatnya daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.”

Realisasi penyerapan belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.241.247.816,00 atau 89,36% dari anggarannya, yang digunakan untuk melaksanakan program – program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.68 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Koperasi Aktif	78,17%	80%	78,43%	98,04%	<ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah 38 koperasi kategori tidak aktif di Kota Probolinggo sedang dalam proses usulan pembubaran koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM RI. • Jumlah Koperasi yang akan mengajukan Badan Hukum kurang pro aktif dalam menyelesaikan kelengkapan administrasi. • Koperasi yang Badan Hukumnya diterbitkan oleh Kementerian / Provinsi yang akan mendirikan cabang di Kota Probolinggo untuk pelaksanaan administrasi banyak yang belum lengkap.
2	Persentase KSP / USP Aktif	77,69%	80%	78,04%	97,55%	Persentase kenaikan dikarenakan ada penambahan jumlah KSP/USP baru
3	Persentase Pengembalian Dana Bergulir	82,75%	82%	83,51%	101,84%	Tercapainya target Persentase Peningkatan Pengembalian Dana Bergulir dikarenakan seringnya frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi antara bank persepsi dengan Dinas Koperindag ditambah dengan prinsip kehati-hatian bank persepsi dalam penyaluran kredit

Sumber : Diskoperindag Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

1. Kekurangcermatan evaluasi penyusunan anggaran dalam proses perubahan anggaran keuangan terkait dengan operasional rutin (tenaga kerja, Listrik, dan air), sehingga menyebabkan nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran di beberapa kegiatan cukup tinggi.
2. Adanya proses verifikasi ulang terhadap penerima manfaat bantuan Peralatan Usaha Bagi UKM yang dilaksanakan setelah DPA ditetapkan, menyebabkan penurunan jumlah penerima manfaat yang juga berimbas pada jumlah serapan anggaran.
3. Terkait dengan Kegiatan Dana Bergulir bagi UMKM, persaingan fasilitas program kredit bunga ringan (KUR) dengan Bank lain cukup berpengaruh signifikan.

2.2.1.16. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo sebagai *leading sector* mengemban amanat untuk mencapai Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 yaitu "Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perkembangan seni dan budaya daerah" dan "Meningkatnya gelarkarya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif."

Program/kegiatan pembangunan pada urusan ini diarahkan untuk melakukan pembinaan kelompok-kelompok seni dan budaya serta mengadakan pameran budaya. Di samping itu, pelestarian seni dan budaya juga dimaksudkan agar sedapat mungkin ragam budaya yang ada memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat pelakunya sehingga pelestarian/pengembangannya mampu dilakukan oleh masyarakat sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

Pada tahun 2016 dilaksanakan tiga program pembangunan yaitu, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan anggaran Belanja sebesar Rp 1.886.943.100,00 dan realisasinya sebesar Rp 1.666.806.250,00 atau 88,33%. Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Kebudayaan diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.69 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase sanggar/kelompok kesenian aktif mengikuti festival seni dan budaya	25%	25%	12%	47%	berkurangnya even even dalam pengembangan budaya
2	Presentase peningkatan jumlah sanggar kesenian	5%	5%	2.00%	40%	Kurangnya peminat dalam berkesenian
3	Prosentase (benda koleksi, situs, kawasan dan cagar budaya) yang dipelihara/dilestarikan	20%	20%	0.4%	2.2%	karena masih belum terbentuk tim ahli untuk cagar budaya

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

1. Berkurangnya even even dalam pengembangan budaya
2. Kurangnya peminat dalam berkesenian
3. Masih belum terbentuk tim ahli untuk cagar budaya

2.2.1.17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka mencapai Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 yaitu "Meningkatnya aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri" dan "Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan", pembangunan Kepemudaan diarahkan pada memfasilitasi kalangan pemuda dalam membangun karakter yang andal sehingga mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi positif dalam aktivitas

sosial/budaya/politik/ekonomi masyarakat bangsa. Sedangkan pembangunan Olahraga diarahkan pada pembinaan dan pembudayaan kegiatan olahraga di masyarakat dengan kaum pemuda diharapkan sebagai tulang punggung, baik dalam rangka pemassalan maupun prestasi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 realisasi pengeluaran definitif sebesar Rp 7.204.194.600,00 atau 91,32% dari anggarannya. Jumlah dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.70 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Pemuda yang menjadi wirausaha	1%	1%	0.11%	11.0%	kurangnya pembinaan dan pembimbingan dalam berwirausaha
2	Prosentase organisasi pemuda yang aktif	5%	5%	30%	600.00%	karena belum ada pendataan target IKU organisasi pemuda yang aktif sehingga berdampak pada target
3	Prosentase pemuda yang berprestasi	1%	1%	0.01%	0.57%	minimnya dalam pengembangan wawasan generasi muda
4	Prosentase cabang olah raga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi	80%	30%	34.78%	116%	organisasi KONI merupakan induk organisasi keolahragaan yang mencari dan membina atlet, DISPOBPAR hanya menerima data dari organisasi induk yaitu KONI
5	Prosentase Atlet berprestasi	5%	5%	3%	55%	minimnya pembinaan tingkat atlet probolinggo

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Minimnya minat para pemuda untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan, walaupun dia punya usaha sendiri
- b. Tidak semua cabang olahraga yang ada melaksanakan kejujprov (kejuaraan provinsi), sedangkan porprov (pekan olahraga provinsi) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali yang sedianya 2 (dua) tahun sekali. Untuk tahun 2016 tidak ada pelaksanaan porprov. Pelaksanaan porprov nanti pada tahun 2019

2.2.1.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban agar kehidupan bermasyarakat di wilayah Kota Probolinggo berlangsung kondusif bagi upaya - upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kecil kemungkinan suatu wilayah dapat melaksanakan aktivitas produktif bilamana aspek keamanan dan ketertiban tidak dijaga dan dipelihara dengan baik.

Jumlah anggaran Belanja Langsung yang disediakan untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 14.289.864.256,00. Penyediaan anggaran tersebut untuk mendanai pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- e. Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat
- f. Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ham)
- g. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.71 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase penurunan kasus miras/narkoba	-35%	25 Kasus	37 Kasus	-37,04%	Tahun 2015 jumlah Kasus terkait Narkoba sebanyak 27 Kasus, pada Tahun 2016 kita targetkan penurunan kasus terkait Narkoba sebesar 5% atau sebanyak 25 Kasus, akan tetapi pada akhir 2016 berdasarkan data yang masuk telah terjadi 37 Kasus terkait Narkoba yang ada di Kota Probolinggo, sehingga Target Kinerja Utama tidak tercapai.
2.	a. Persentase peningkatan ormas/LSM yang terdaftar	4%	152 LSM dan Ormas	149 LSM dan Ormas	3,47%	Jumlah LSM dan Ormas yang terdata pada Desember 2015 sebanyak 144 LSM dan Ormas, pada Tahun 2016 kita targetkan peningkatan Ormas/LSM yang terdaftar sebesar 5% atau 152 LSM dan Ormas, akan tetapi pada akhir Desember 2016 berdasarkan data yang masuk terdapat 149 LSM dan Ormas yang terdaftar.
	b. Persentase Parpol yang terverifikasi sesuai pedoman dan tepat waktu	100%	8 Parpol	6 Parpol	75,00%	Dari 8 Parpol yang ada di mendapatkan kursi di DPRD hanya 6 Parpol yang terverifikasi untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Parpol, hal ini dikarenakan terjadi konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mencairkan bantuan keuangan parpol

3.	Persentase penyelesaian pelanggaran HAM	100%	0 Kasus	0 Kasus	0%	Indikator Kinerja Jumlah Kejadian HAM yang terselesaikan dari jumlah kejadian terkait HAM 2016 sebesar 0%, hal ini dikarenakan jumlah laporan kejadian terkait dengan pelanggaran HA sebesar 0 kali laporan, sehingga secara umum dapat dikatakan Masyarakat mulai memahami pentingnya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
4.	Persentase penurunan angka gangguan kriminalitas	-189%	362 Kasus	433 Kasus	-13,65%	Pada Tahun 2015 terjadi peningkatan 249 kasus gangguan kriminal (kejadian tahun 2014 sebesar 132 kasus pada tahun 2015 sebesar 381) jadi target penurunan 5% tidak terpenuhi malah naik sebesar 189%
						Pada Tahun 2016 terjadi kenaikan kasus gangguan kriminalitas sebesar 14% atau 52 kasus (dari 381 kasus menjadi 433 kasus gangguan kriminal), sehingga target penurunan angka gangguan kriminalitas sebesar 5% atau menjadi 362 kasus tidak tercapai bahkan terjadi kenaikan kasus menjadi 433 kali.
5.	Persentase penyelesaian konflik terkait poleksosbud	22%	2 Kasus/Konflik	5 Kasus/Konflik	38,46%	Berdasarkan data Pada Tahun 2016 terdapat 13 kasus penyebab potensi konflik di Kota Probolinggo, dari 13 kasus penyebab potensi konflik tersebut 5 kasus sudah terselesaikan

Sumber : Bakesbangpol Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

1. Operasi yustisi belum menyentuh pada keberadaan orang asing yang bermukim diperkampungan dan guru asing yang berada di sekolah, gereja ataupun pondok pesantren
2. Kurangnya kesadaran pihak pengelola hotel untuk melaporkan tamu asing meskipun telah diberikan dan contoh laporan
3. Belum tersedianya panti Rehabilitasi narkoba bagi pemakai narkoba;
4. Belum adanya alat detektor narkoba, sehingga kesulitan dalam pendeteksian penyalahgunaan narkoba pada saat operasi yustisi;
5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi mengenai FKDM dan FPK menjadi masalah tersendiri atas belum terbentuknya kepengurusan
6. Peran Panitia Pelaksana RANHAM Kota Probolinggo hanya terfokus pada bidang diseminasi dan pendidikan HAM sedang pada bidang lain kurang maksimal seperti pada saat pembahasan RAPERDA Panitia Pelaksana Ranham Kota Probolinggo tidak dilibatkan sehingga peran Panpel dalam harmonisasi Peraturan Daerah tidak berjalan,
7. Anggota Korsik Pemerintah Kota yang kurang disiplin baik dalam pelaksanaan latihan untuk persiapan unjuk gelar even besar Pemerintah Kota maupun dalam kehadiran kegiatan upacara bendera rutin
8. Kesadaran PNS dalam mengikuti Upacara Bulanan masih rendah.

2.2.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Penyelenggaraan Urusan ini diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas seluruh tatanan administrasi Pemerintah Kota Probolinggo, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin pengabdian, keteladanan serta kesejahteraan aparatur pemerintah daerah sehingga secara keseluruhan mampu melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Pada hakekatnya seluruh SKPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan ini karena semua tugas pokok dan fungsi SKPD merupakan pelaksanaan otonomi daerah. Sesuai dengan Sasaran – Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2014 – 2019, pengelompokan pelaksana urusan menurut Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan alokasi anggaran tahun 2016, sebanyak 21 unit kerja menyelenggarakan kegiatan/program dalam lingkup urusan ini. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 283.695.197.428,18 dan realisasi pengeluaran definitif sampai dengan 31 Desember 2016 berjumlah Rp. 209.927.669.444,52 atau 74%.

a. Sekretariat Daerah

Tahun 2016 Sekretariat Daerah menyelenggarakan berbagai program - program pokok meliputi antara lain :

- a. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- b. Program Pengembangan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masy.
- c. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- g. Program Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan HAM
- h. Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat
- i. Program Pemanapan Otonomi Kota
- j. Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan
- k. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- l. Program Pengembangan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masy.
- m. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2016 pengukurannya terinci seperti pada Tabel berikut;

Tabel 2.72 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAGIAN HUKUM TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	81 %	100%	99,66 %	99,66 %	Beberapa produk hukum yang tengah diproses dibatalkan oleh SKPD pengusul
2	Persentase perkara di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang ditangani	100 %	100%	100 %	100 %	Berkas terkait penanganan perkara segera mungkin dikoordinasikan dengan SKPD terkait untuk kemudian diselesaikan sesuai SOP
3	Persentase pengguna layanan informasi hukum	91 %	50%	47,69%	95,38%	Informasi produk hukum yg disajikan masih belum lengkap, sehingga perlu diupdate secara berkala

Tabel 2.73 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAGIAN KESRA TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan	75%	80%	100%		Pengajuan Tim Pembina UKS dibandingkan hasil SK Tim Pembina UKS
2	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan	75%	80%	100%		Pengajuan Tim Penanggulangan DBD dibandingkan hasil SK Tim Penanggulangan DBD
3	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana	100%	80%	100%		Pengajuan Kepengurusan Masjid Agung dibandingkan hasil SK Kepengurusan Masjid Agung
4	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan	60%	80%	100%		Pengajuan Kepengurusan Masjid Pemkot dibandingkan hasil SK Kepengurusan Masjid Pemkot

Tabel 2.74 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu	100%	100%	100%		
2	Hasil penilaian kinerja bagian administrasi pembangunan dari kepala daerah terhadap penyediaan informasi dan data	Baik	Baik	Baik		

Tabel 2.75 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase layanan informasi yang dilayani	100%	100%	100%	100%	Kesadaran masyarakat dalam mencari informasi
2	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	80%	50%	80%	160%	Karena ditunjang dengan pelatihan atau Bimtek
3	Prosentase informasi nasional yang terdistribusi	100%	90%	100%	111,11%	Optimalisasi dalam menyampaikan lewat media baik media elektronik maupun media luar ruang
4	Prosentase kelompok informasi aktif	100%	90%	100%	111,11%	Dengan sering mengadakan sosialisasi
5	Prosentase SKPD yang telah terkoneksi internet melalui LAN / WAN	70%	75%	100%	133,33%	Ditunjang dana APBD memadahi
6	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan sistem informasi pemerintahan	80%	50%	80%	160.00%	Peningkatan SDM melalui dibimtek
7	Prosentase fasilitas umum yang dilengkapi WIFI	2	4	4	100.00%	Ditunjang dana APBD yang memadahi
8	Prosentase wartedl/warnet yang berijin	85%	90%	90%	100.00%	Dengan mengoptimalkan sosialisasi kepada pemilik warnet/Wartel
9	Prosentase menara telekomunikasi yang berijin	85%	90%	70%	77.78%	Banyaknya warnet yang tutup
10	Prosentase informasi yang diamankan	80%	80%	80%	100.00%	Penyampaian Sosialisasi Inforformasi sekala prioritas kepada SKPD

Tabel 2.76 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Survey Kepuasan Masyarakat	0.00%	92.00%	96.39%	104.77%	Realisasi Kinerja dapat tercapai karena adanya Survey kepuasan masyarakat melalui Hasil perhitungan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan 9 unsur pelayanan yang dikaji PERMENPAN No.16 Tahun 2014
2	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	0.00%	100.00 %	100.00%	100.00%	Realisasi kinerja dapat tercapai karena selalu diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan publik
3	Persentase pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Mayangan	0.00%	92.00%	94.33%	102.53%	Realisasi kinerja dapat tercapai karena pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Mayangan yang tepat waktu
4	Persentase pelayanan administrasi umum lainnya pada Kecamatan Mayangan yang tepat waktu	0.00%	92.00%	97.65%	106.14%	Realisasi kinerja dapat tercapai karena diukur melalui Pelayanan administrasi perkantoran dan persyaratan yang lengkap
5	Persentase Kelurahan yang memenuhi standart kreteria baik	0.00%	80.00%	80.00%	100.00%	Realisasi kinerja dapat tercapai melalui penyampaian data

						laporan diatas 75% dari seluruh laporan rutin (Absensi pegawai, Kependudukan, Keamanan Terpadu, Laporan Kematian, Monografi Kelurahan dan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat) tepat waktu; Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang baik; Pengaduan di kelurahan yang telah selesai ditindaklanjuti diatas 75%.
6	Persentase RW Aktif	0.00%	76.00%	26.19%	34.46%	Realisasi capaian kinerja tidak dapat terlaksana sesuai target dikarenakan dari 42 RW yang ada di Kecamatan Mayangan hanya 11 RW yang memenuhi kriteria RW Aktif
7	Persentase Laporan tepat waktu	0.00%	92.00%	55.10%	59.89%	Realisasi capaian kinerja tidak dapat terlaksana sesuai target dikarenakan surat laporan permintaan dari pihak lain terkadang mendadak sehingga mengakibatkan laporan tidak tepat waktu

**Tabel 2.77 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase SKPD yang menyampaikan LPPD Satker tepat waktu	100.00%	100%	100.00%	100.00%	Kegiatan Tercapai. (Pada Kegiatan LPPD Target 2016 adalah 100 % dengan Realisasi kinerja sampai pada akhir tahun anggaran mencapai 100 % sedangkan Hasil Capaian untuk kegiatan LPPD mencapai 100 %, hal ini dikarenakan karena adanya partisipasi dari seluruh SKPD yang sangat bagus dan merespons terhadap kegiatan LPPD sehingga penyampaian LPPD bisa tepat waktu).
2	Prosentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN dengan baik	80.00%	75%	80.00%	80.00%	Kegiatan Tercapai (Pada Kegiatan PATEN target 2016 adalah 100 % dengan realisasi kinerja sampai pada akhir tahun anggaran 2016 mencapai 100% sedangkan hasil capaian untuk kegiatan PATEN mencapai 100%, hal ini disebabkan karena tingkat intensitas yang tinggi dan rutin pada acara pembinaan aparatur Kelurahan guna peningkatan Pelayanan Administrasi di setiap Kelurahan dan Kecamatan serta pemberian Rewards dan Punishment kepada setiap Kelurahan dan Kecamatan yang mendapat predikat terbaik dalam hal Pelayanan).
3	Prosentase Kerjasama yang terealisasi dibandingkan dengan rencana kerjasama yang diajukan	80.00%	90%	94.64%	105.16%	Kegiatan Tercapai (Pada Kegiatan Kerjasama target 2016 adalah 85% dengan realisasi kinerja sampai pada akhir tahun anggaran 2016 mencapai 85% sedangkan hasil capaian untuk kegiatan Kerjasama mencapai 85%, hal ini disebabkan karena tingkat Kebutuhan setiap SKPD yang semakin meningkat utamanya dalam bidang kerjasama baik kerjasama dengan lembaga swasta atau pihak Ketiga, Kerjasama Antar Daerah, dan Kerjasama Luar Negeri, dalam bidang IPTEK, Pendidikan dan Pelatihan, dsb.).

4	Prosentase Proposal sertifikasi yang terverifikasi dengan data by name by address	80.00%	75.00 %	80.00%	80.00%	Kegiatan Tercapai (Pada Kegiatan Operasional Pertanahan Daerah target pada 2016 adalah 80% dengan realisasi kinerja sampai pada akhir tahun anggaran 2016 mencapai 80%, sedangkan hasil capaian untuk kegiatan Operasional Pertanahan Daerah mencapai 80%, hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran Operasional Pertanahan Daerah yakni pada Belanja Sertifikasi yang dialihkan ke DPPKA bidang Aset, sehingga kegiatan di Pemerintahan hanya bersifat memverifikasi untuk kemudian di rekomendasikan ke Ibu Walikota Agar bisa di ikut sertakan dalam Pensertifikatan. Jadi kesimpulannya Bagian Pemerintahan bekerjasama dengan BAPPEDA hanya sebagai Verifikator saja.
---	---	--------	---------	--------	--------	--

**Tabel 2.78 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN UMUM TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai SKM di bidang kerumahtangaan	79.12	100	78.13	78%	Terdapat penurunan capaian dari realisasi tahun 2015 karena penilaian di tahun 2015 masih bersumber dari laporan hasil SKM Bagian Umum secara keseluruhan. Masih belum spesifik pada masing-masing Sub Bagian. Namun meskipun realisasi tahun 2016 belum mencapai target, nilai interval konversi IKM yang dicapai (78,13) tergolong kategori B yaitu mutu kinerja pelayanan publik " BAIK ". Di tahun mendatang akan tetap dilakukan peningkatan sehingga mendapat realisasi yang semakin mendekati target.
2	Persentase layanan kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Setda Kota Probolinggo	79.12	100	78.16	78%	Terdapat penurunan capaian dari realisasi tahun 2015 karena penilaian di tahun 2015 masih bersumber dari laporan hasil SKM Bagian Umum secara keseluruhan. Masih belum spesifik pada masing-masing Sub Bagian. Namun meskipun realisasi tahun 2016 belum mencapai target, nilai interval konversi IKM yang dicapai (78,16) tergolong kategori B yaitu mutu kinerja pelayanan publik " BAIK ". Di tahun mendatang akan tetap dilakukan peningkatan sehingga mendapat realisasi yang semakin mendekati target.
3	Persentase pelayanan ketatausahaan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	79.12	100	78.2	78%	Terdapat penurunan capaian dari realisasi tahun 2015 karena penilaian di tahun 2015 masih bersumber dari laporan hasil SKM Bagian Umum secara keseluruhan. Masih belum spesifik pada masing-masing Sub Bagian. Namun meskipun realisasi tahun 2016 belum mencapai target, nilai interval konversi IKM yang dicapai (78,2) tergolong kategori B yaitu mutu kinerja pelayanan publik " BAIK ". Di tahun mendatang akan tetap dilakukan peningkatan sehingga mendapat realisasi yang semakin mendekati target.

**Tabel 2.79 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	80%	80%	80%	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah yang berkualitas	Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tetap bertahan di tengah fluktuasi ekonomi kota dapat menginspirasi pelaku usaha lainnya untuk selalu berinovasi
2	Mewujudkan pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah	82%	80%	86%	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan merata	Pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan peran serta dari masyarakat kota Probolinggo itu sendiri yang berdaya saing secara sehat dan positif demi kemajuan pengembangan ekonomi
3	Mewujudkan perkembangan informasi dan peningkatan perekonomian tentang Peluang Potensi Komoditi Daerah.	88%	80%	90%	Terwujudnya perkembangan informasi (inflasi) dan meningkatnya peluang potensi komoditi daerah	Banyaknya potensi yang dimiliki Kota Probolinggo membuat masyarakat terstimulasi untuk mengembangkan potensi yang ada

Disamping itu, dapat diinformasikan mengenai realisasi indikator output dari kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada periode tahun 2016 untuk masing - masing unit di lingkungan Sekretariat Daerah. Kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak seluruhnya berada dalam lingkup Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, melainkan juga terdapat pada Urusan pemerintahan yang lain. Kondisi ini sebagai konsekuensi dari terdapatnya pelaksanaan tupoksi/program yang bersifat lintas SKPD (*cross cutting function/program*), dimana unit di lingkungan Sekretariat Daerah berfungsi sebagai pendukung pencapaian target pada Urusan lain tersebut (pengukuran capaian kinerja tidak dilakukan tersendiri melainkan bersifat agregat/proxy terhadap capaian kinerja dari SKPD pengampu Urusan pemerintahan bersangkutan).

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka mendukung tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD melaksanakan program pokok yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Atas pelaksanaan program pokok tersebut, kinerja Sekretariat DPRD terlihat pada Tabel 2.80

**Tabel 2.80 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
-----	-------------------------	----------------	-------------	----------------	--------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Survey Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD	82,90 %	70%	74,77%	106,81%	Secara umum pelayanan sekretariat DPRD terhadap DPRD telah memenuhi target yang telah ditentukan, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan. Penurunan tingkat kepuasan DPRD tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penyebaran informasi secara on-line • Kurangnya sosialisasi produk DPRD kepada masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga sosial • Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan system teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekretariat DPRD • Kurangnya pelaksanaan keamanan di gedung DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Terbatasnya Sumberdaya manusia
- b. Terbatasnya sarana prasarana
- c. Terbatasnya sumber dana yang tidak memenuhi

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penetapan arah tersebut mengingat bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPPKA dituntut senantiasa mampu menggali sumber-sumber pendanaan dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah, diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif guna mengamankan baik sisi penerimaan daerah maupun pengeluaran anggaran daerah.

Realisasi capaian kinerja tahun 2016 secara umum cukup baik seperti tampak pada Tabel 2.81

**Tabel 2.81 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DPPKA TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	9	9	9	100.00	
2	Persentase peningkatan PAD	142%	100%	112%	112%	Penambahan potensi PAD baru
3	Persentase penurunan piutang pajak	2%	100%	31%	31%	Kesadaran wajib pajak membayar piutang pajak masih

						kurang
4	Opini BPK	WDP	WTP	WDP	WDP	Bergantung pada Opini BPK
5	Persentase SKPD yang telah melaksanakan sistem akrual dengan benar	40	40	40	100%	
6	Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu	40	40	40	100%	
7	Persentase Aset Tetap Tanah yang bersertifikat	37	70	34	49%	Proses penyelesaian sertifikat melalui beberapa tahap yang memerlukan waktu, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Sumber : DPPKA Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala yaitu Pengadaan tanah yang tidak terlaksana (Ex Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur), dikarenakan menunggu jawaban terkait proses tukar menukar aset Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Probolinggo dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

d. Inspektorat

Inspektorat Kota Probolinggo melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan garis kebijakan yang ditetapkan Walikota. Untuk mewujudkan pengawasan secara efisien dan efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Probolinggo, Inspektorat senantiasa mengupayakan langkah - langkah koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan. Disamping itu, dilakukan langkah - langkah untuk meningkatkan kompetensi teknis personel melalui pengiriman tenaga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta melakukan penugasan bersama (*joint audit*) dengan APIP.

Realisasi capaian kinerja tahun 2016 secara umum cukup baik seperti tampak pada Tabel 2.82

Tabel 2.82 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT TAHUN 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP B ke atas	25%	45%	45%	100%	Tercapainya target karena ada perbaikan dari rekomendasi atas evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.
2	Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan	78,04%	85%	68,29%	80,34	Target belum tercapai karena masih banyak SKPD yg belum memahami SPI dan terus dilakukan penilaian maturitas secara berkelanjutan atas implementasi SPIP
3	Prosentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti	84%	95%	93,09%	97,99%	Masih ada beberapa Rekomendasi meskipun ditindaklanjuti namun masih belum sesuai dengan rekomendasi seperti blm ada buki rekomendasi atau perbaikan dari rekomendasi
4	Prosentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	22,41%	95%	99,01%	104,21%	Kepatuhan SKPD dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan APIP

Sumber : Inspektorat Kota Probolinggo (diolah)

e. Badan Kepegawaian Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, BKD menyelenggarakan manajemen personel agar sesuai dengan tuntutan otonomi daerah melalui pelaksanaan program/kegiatan meliputi evaluasi terhadap formasi dan pengadaan pegawai, pengelolaan mutasi dan promosi pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta merancang pola/sistem kesejahteraan pegawai.

Realisasi capaian kinerja tahun 2016 secara umum cukup baik seperti tampak pada Tabel 2.83

**Tabel 2.83 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Survei Kepuasan layanan kepegawaian	73.12	80	79.13	98.91%	Nilai survey kepuasan layanan kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo menargetkan nilai 80 dan realisasi nilai 79,13 sehingga capaian kerjanya 98,91% atau dengan kategori "Baik", hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo memuaskan dan mendapat apresiasi yang baik oleh pengguna jasa pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.
2	Prosentase record Pegawai yang diupdate	73.38%	80%	64.05%	80.06%	Pada indikator kinerja utama ini, target tahun 2016 adalah 80% dari jumlah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yaitu sebesar 4.460 orang. Up dating data sangat diperlukan apalagi terkait dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga data PNS wajib diperbaharui atau di updating. Dari target 80 % yang di updating terealisasi sebesar 2.857 orang sudah di updating, dengan demikian capaian indikator ini yaitu sebesar 64,05% dengan kategori Cukup. Permasalahan : Hal ini tidak terlepas dari peran SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk selalu mengirimkan peremajaan data setiap berkala atau setiap ada perubahan data. Pengiriman data tersebut akan berdampak pada kualitas dari informasi yang valid, lengkap, up date, akurat, sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan di bidang kepegawaian dapat terwujud. Solusi : selalu mengingatkan SKPD agar mengirimkan peremajaan data pegawai setiap berkala atau setiap ada perubahan data.
3	Prosentase Aparatur yang memahami hasil Diklat	85%	80%	89.28%	111.60%	Untuk indikator prosentase aparatur yang memahami hasil diklat pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo telah menargetkan 85% dari jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan melaksanakan evaluasi dampak diklat. Evaluasi Dampak Diklat merupakan salah satu bentuk

						pengontrolan mutu dari penyelenggaraan diklat yaitu mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan diklat. Pengukuran tingkat keberhasilan diklat ini menggunakan metode kuisioner yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kompetensi alumni diklat yang didapatkan dan bagaimana relevansi di tempat tugas. Realisasi untuk indikator aparatur yang memahami hasil diklat adalah sebesar 89,28 % dengan capaian sebesar 111,60% dengan kategori "Sangat Baik" dalam arti ilmu yang diperoleh selama aparatur mengikuti diklat dinilai sangat efektif bagi alumni diklat dan bagi organisasinya.
4	Prosentase Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.41%	0.50%	0.53%	106.00%	Pada indikator prosentase tingkat pelanggaran disiplin, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada tahun 2016 menargetkan sebesar 0,50% dari jumlah PNS di lingkungan Kota Probolinggo. Realisasi tingkat pelanggaran disiplin yaitu sebesar 0,53% dengan capaian sebesar 106% dengan kategori "Kurang" yaitu rentang >100% (progress negative) dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo belum mampu untuk menekan tingkat pelanggaran disiplin PNS. Permasalahan : Khusus indikator ini sepiantas kontradiktif dibandingkan rencana, yakni tingginya pegawai yang mendapatkan punishment. Namun apabila kita memaknai lebih mendalam, maka tingginya punishment tersebut lebih disebabkan karena telah meningkatnya kesadaran dan pemahaman atasan langsung terhadap bawahannya yang melanggar disiplin pegawai, yakni melaporkan dan memberikan tindakan sebagaimana ketentuan regulasi. Solusi : Kedepan, baik teradap Unsur Staf maupun Atasan Langsung akan dilakukan pembinaan yang lebih intensif lagi sehingga kasus-kasus pelanggaran disiplin dapat diminimalisir. Atasan Langsung mampu secara konkrit melaksanakan waskat maupun bentuk pengawasan internal lainnya. Kedua hal pokok tersebut apabila dapat berlangsung selaras dan sinergi, besar harapannya punishment akan berkurang signifikan; sebaliknya kinerja di setiap lini makin baik dan meningkat seiring reward yang akan intensif pula diberikan, semakin banyaknya aparatur yang memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sehingga terjadi kekawatiran apabila ada aparatur yang melakukan tindakan indisipliner yang tidak dilaporkan. Solusi : Memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin pegawai
5	Prosentase penetapan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan	96.75%	100%	89.99%	89.99%	Pada indikator prosentase penetapan pejabat struktural sesuai kebutuhan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo telah berupaya untuk menetapkan pejabat yang sesuai dengan kriteria jabatan, baik tingkat pendidikan, tingkat kemampuan, tingkat keahlian dengan selektif dan berbagai upaya yang dilakukan diantaranya melalui uji kompetensi bagi pejabat struktural, kegiatan pengisian lowongan jabatan yang kosong secara terbuka serta evaluasi dan analisis oleh Tim BAPERJAKAT. Data di Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada Desember 2016 menunjukkan jumlah total pejabat struktural sebanyak 665 PNS yang terdiri dari Eselon II-a sebanyak 1 (satu) orang, eselon II-b sebanyak 24 orang, eselon III-a sebanyak 45 orang,

						<p>eselon III-b sebanyak 70 orang, eselon IV-a sebanyak 337 orang, eselon IV-b sebanyak 175 orang, eselon V-a sebanyak 13 orang. Sedangkan jumlah jabatan eselon yang harus ada sejumlah 739 jabatan, sehingga pada tahun 2016 jabatan yang kosong sebanyak 74 jabatan. Permasalahan : 1. Calon Pejabat / Kader PNS terbatas jumlahnya 2. Pada penataan OPD, beberapa OPD yang diprediksi tipe akan turun (ada beberapa OPD yang berkurang jumlah jabatannya/ demosi jabatan), berkurangnya jabatan akan didistribusiakan ke jabatan yang lainnya sambil menunggu momentum penataan OPD yang baru 3. Kompetensi : beberapa jabatan yang memerlukan kompetensi khusus (Jabatan di Dinas PU, Pertanian, Keuangan Akuntansi, Permukiman) pejabat yang memiliki kompetensi khusus tsb sedikit jumlahnya. Solusi : 1. Menunggu selesainya penataan OPD secara definitif. 2. melakukan ujian penyesuaian ijasah pada kompetensi / jabatan khusus 3. Melaksanakan rekrutmen pegawai/ pengadaan CPNS.</p>
6	Prosentase Aparatur yang mendapatkan penghargaan	2.22%	10%	2.29%	22.90%	<p>Dalam meningkatkan motivasi terhadap PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat maka Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah memberikan penghargaan terhadap pegawai berprestasi dan penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang dipilih melalui seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari target 10% yang ditetapkan BKD, tercapai 2,29% dengan capaian sebesar 22,90% masih tergolong KURANG, Permasalahan : tidak tercapainya realisasi target ini adalah minimnya usulan dari SKPD untuk mengikuti pegawai berprestasi dan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan setelah dilakukan seleksi administrasi beberapa diantaranya tidak memenuhi syarat administrasi selain itu pada pemilihan PNS berprestasi kategori tenaga pendidik telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Solusi : tiap-tiap SKPD agar melaksanakan sendiri PNS berprestasi di tingkat SKPD sehingga dari hasil pelaksanaan tersebut dapat dikirim dan diusulkan untuk mengikuti PNS berprestasi di tingkat Kota.</p>

Sumber : BKD Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan untuk melaksanakan Seleksi Terbuka sebelum Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru telah ditetapkan dan seluruh pejabat struktural telah dilantik/dikukuhkan. Hal ini mengakibatkan rencana penyelenggaraan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tidak dilaksanakan. Sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dapat terserap secara optimal dan target kinerja tidak terpenuhi.
- b. Pemberian Beasiswa cost sharing bagi PNS yang mengikuti tugas belajar Bappenas sebanyak 4 orang dan 1 orang PNS tidak dapat mengikuti tugas

- belajar Beasiswa S2 Program Profesi Psikologi Klinis karena yang bersangkutan tidak lulus seleksi masuk perguruan tinggi.
- c. Pada kegiatan Pensiun PNS Fungsional terdapat pemeriksaan kesehatan bagi PNS fungsional yang diindikasikan tidak cakap jasmani usulan dari Dinas Pendidikan yaitu fungsional Guru sebanyak 17 orang. Dalam perjalanan tahun 2016, PNS yang diusulkan pemeriksaan kesehatan, ada yang meninggal dunia 2 orang, 1 orang mengundurkan diri (tidak berkenan untuk diperiksa kesehatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan), dan 1 orang sedang menjalani proses kemoterapi.
 - d. Secara umum kegiatan Mutasi PNS Fungsional antara lain Mutasi intern, mutasi keluar dan mutasi masuk Kota Probolinggo. Khusus mutasi intern terdapat kegiatan mutasi Kepala Sekolah, pada Dinas Pendidikan terdapat tim untuk membahas mutasi kepala sekolah tersebut sehingga tugas BKD hanya melaksanakan proses pengukuhan saja. Pada mutasi keluar dan mutasi masuk pada Badan Kepegawaian Daerah juga perlu dibentuk tim yang membahas usulan PNS yang akan mutasi keluar maupun mutasi masuk.
 - e. Pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit Pejabat fungsional tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, terdapat pejabat fungsional yang terlambat dalam mengumpulkan usulan angka kreditnya sehingga sampai dengan saat ini masih ada proses penilaian yang belum terselesaikan.
 - f. Usulan kebutuhan formasi dan penataan Pegawai untuk pengadaan CPNS Tahun 2016, dengan rincian Kebutuhan pegawai berdasarkan ABK sebanyak 6.569 orang, Bezeting / kekuatan PNS akhir tahun 2015 sebanyak 4.458 Kekurangan PNS Tahun 2016 sebanyak 2.111 Orang, usulan formasi PNS 2.111 orang dengan rincian : Tenaga JFT lain 475 orang dan JFU 1.636 orang. Permasalahan : dengan adanya pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) untuk tenaga pendidik dan kependidikan setingkat SMA/SMK dan adanya perubahan SOTK baru sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.

2.2.1.20. Urusan Ketahanan Pangan

Sebagai wilayah urban, masalah ketahanan pangan di Kota Probolinggo tidak berkaitan dengan aspek produksi melainkan lebih pada aspek distribusi yang menjamin ketersediaan bahan pangan pada seluruh bagian wilayah Kota Probolinggo secara tepat waktu dan jumlah. Seiring dengan kondisi umum pola konsumsi bahan pangan masyarakat yang bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat yang cenderung berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara

kebutuhan dan pasokan, perlu dilakukan upaya – upaya promotif agar masyarakat mengkonsumsi bahan – bahan non beras dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Untuk tahun 2016, Urusan Ketahanan Pangan memperoleh alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.160.934.300,00 untuk melaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Tingkat penyerapan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar 82,41% dari anggarannya atau sebesar Rp 956.706.575,00 dengan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.84 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Ketersediaan energi dan protein (kkal/kapita/ hari)	203.51	207.00	203.51	98.31	
2	Jumlah cadangan pangan	5,744.00	5,850.00	5,744.00	98.19	
3	Persentase penanganan daerah rawan pangan	1.00	1.00	1.00	100.00	
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89.40	2.00	89.40	109.02	
5	Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan	66.67	81.00	66.67	82.31	

Sumber : Dinas Pertanian Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Keterbatasan lahan pertanian yang memproduksi tanaman pangan;
- b. Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk mengoptimalkan ketersediaan pangan lokal/umbi-umbian;
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau adanya asumsi bahwa mengkonsumsi umbi-umbian merupakan konsumsi makanan orang yang tidak mampu.

2.2.1.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu menjadi subyek pembangunan serta mengurangi kemiskinan/pemiskinan struktural pada lapisan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks tersebut pelaksanaan program/kegiatan pembangunan difokuskan untuk memberdayakan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, komunitas – komunitas masyarakat, dan anggota masyarakat sebagai individu.

Realisasi definitif berjumlah Rp 6.482.051.406,00 atau 77,45% dari anggaran yang diserap dalam pelaksanaan program berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- c. Program Pengembangan Usaha Ekonomi mendukung Usaha Sektor Informal
- d. Program Pendampingan Pengentasan Kemiskinan
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- f. Program Pemantapan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.85 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kelompok usaha ekonomi masyarakat yang aktif	29 lembaga	29	29	100	Data BKM se Kota Probolinggo ada 29 BKM yang aktif
2	Jumlah Kelompok usaha ekonomi keluarga	25 kelompok	30	28	93	Data tersebut merupakan kelompok UPKu yang aktif
3	Jumlah penerima manfaat pos pelayanan teknologi (posyantek) dan warung teknologi (wartek)	0 orang	250	241	96.4	Data tsb belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi
4	Jumlah pelaksanaan pameran teknologi tepat guna (TTG)	1 kegiatan	1	1	100	Tahun 2016, Gelar TTG Nasional berlokasi di Mataram
5	Jumlah kelompok pengguna aksesibilitas prasarana dasar mendukung usaha sektor informal	32 orang	32	30	93.75	Jumlah pengguna tdk target karena pindah alamat rumah
6	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengembangan prasarana dasar masyarakat	1 kegiatan	1	1	100	Jumlah keg. Expo Tahun 2016 berlokasi di Denpasar Bali
7	Jumlah keg. dlm upaya peningkatan swadaya potensi masyarakat	1 kegiatan	1	1	100	Keg. Bulan Bhakti Gotong Royong Masy. diharapkan mampu meningkatkan swadaya masy.
8	Jumlah keg. promosi hasil usaha pelaku ekonomi masyarakat	1 kegiatan	1	1	100	Keg. Pameran dlm mendukung keg. SEMIPRO melibatkan UPKU aktif
9	Jumlah peserta pengisian data dasar keluarga profil kelurahan	29 orang	29	29	100	Peserta Bimtek pada 29 Kelurahan
10	Jumlah LPM yang berperan aktif di Kelurahan	29 lembaga	29	29	100	Terdapat 29 LPM pada 29 Kelurahan se Kota Probolinggo
11	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat yang telah memiliki sertifikasi masyarakat	58 orang	58	58	100	Terdapat 58 orang KPM pd 29 Kelurahan @2orang

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat (diolah)

2.2.1.22. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan pada pokoknya adalah untuk membangun minat baca masyarakat, khususnya pada kalangan kaum muda dan anak - anak dalam rangka mewujudkan budaya baca di masyarakat. Penyelenggaraan Urusan ini memiliki keterkaitan erat dalam mendukung capaian

kinerja pada Urusan Pendidikan (pemberantasan kebutaaksaraan fungsional/KAF dan perbaikan/peningkatan daya literasi masyarakat).

Tahun 2016 alokasi anggaran yang disediakan untuk Belanja sebesar Rp 3.701.027.595,00 dengan realisasinya sebesar Rp 3.414.150.059,00 atau 92,25%. Sedangkan satu program pokok yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Perpustakaan diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.86 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase peningkatan buku yang dipinjam	0.1%	-0,2%	-0,12%	60	Dengan tidak tercapainya target pada indikator persentase peningkatan kunjungan masyarakat, secara otomatis mempengaruhi peningkatan buku yang dipinjam
2	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat	0.69%	0,02%	0,01%	50	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin canggihnya teknologi yang ada, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat • Semakin berkurangnya kunjungan pelajar ke perpustakaan umum yang merupakan mayoritas pengunjung terbanyak, dikarenakan jam pulang sekolah yang semakin sore sehingga bersamaan dengan jam tutup layanan perpustakaan umum
3	IKM layanan perpustakaan	73 indeks	72,5 indeks	73,2 indeks	100.97	Dengan tercapainya target berarti kita sudah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- Gedung perpustakaan umum yang jauh dari standart, sehingga menyebabkan tampilan penataan ruangan yang kurang maksimal
- Masih minimnya kelembagaan perpustakaan di instansi swasta/pemerintah, dan pondok pesantren/rumah ibadah
- Masih rendahnya minat baca dan minat kunjung ke perpustakaan dikarenakan semakin canggihnya teknologi
- Masih terbatasnya jumlah produksi buku/terbitan Kota Probolinggo sehingga koleksi yang masuk perpustakaanpun terbatas

2.2.1.23. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan pada tahun 2016 memperoleh anggaran Belanja Langsung Rp 786.383.500,00 untuk penyelenggaraan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip. Realisasi pengeluaran definitif per 31 Desember 2016 berjumlah Rp 690.861.560,00 atau 87,85%. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan tiga program, yaitu Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan.

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Kearsipan diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.87 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100%	100%	100%	100	Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku
2	Jumlah SKPD, Kelurahan dan BUMD/Swasta/Organisasi Masyarakat yang memiliki kemampuan pengelolaan arsip	89 lembaga	79 lembaga	109 lembaga	137.97	Jumlah petugas pengelola arsip, terdiri dari: SKPD = 40 orang; kelurahan = 29 orang; dan lembaga pendidikan = 40 orang
3	Persentase arsip yang diakuisisi	24%	38%	40%	105	Banyak SKPD yang sudah menyerahkan arsip statisnya kepada lembaga kearsipan daerah (LKD), dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Arsip
4	Persentase dokumen/arsip yang dialihmediakan	17%	70%	73%	104	Banyak arsip vital yang sudah dialih mediakan, terutama arsip letter c
5	Persentase arsip statis dalam kondisi baik	94%	94%	97%	103	Dengan jumlah arsip statis yang melebihi target, maka jumlah arsip statis yang tersimpan di depo arsip telah terpelihara dengan baik pula, karena secara rutin telah dilakukan pemeliharaan arsip
6	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan arsip	100%	100%	100%	100	Semua pengunjung telah menerima layanan jasa kearsipan dengan baik

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang hampir di setiap lembaga pemerintah/swasta
- Minimnya SDM fungsional pustakawan dan arsiparis di Kota Probolinggo.

2.2.1.24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2016 pelaksanaan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Realisasi penggunaan dana sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar

Rp 11.856.616.298,00 atau 94,08% dari anggaran yang tersedia yang digunakan untuk melaksanakan program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program Pengolahan Data dan Penyajian Data Informasi
- c. Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa
- d. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
- e. Program Peningkatan Pelayanan Persandian
- f. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
- g. Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
- h. Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.88 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase layanan informasi yang dilayani	100%	100%	100%	100%	Kesadaran masyarakat dalam mencari informasi
2	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	80%	50%	80%	160%	Karena ditunjang dengan pelatihan atau Bimtek
3	Prosentase informasi nasional yang terdistribusi	100%	90%	100%	111,11%	Optimalisasi dalam menyampaikan lewat media baik media elektronik maupun media luar ruang
4	Prosentase kelompok informasi aktif	100%	90%	100%	111,11%	Dengan sering mengadakan sosialisasi
5	Prosentase SKPD yang telah terkoneksi internet melalui LAN / WAN	70%	75%	100%	133,33%	Ditunjang dana APBD memadahi
6	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan sistem informasi pemerintahan	80%	50%	80%	160,00%	Peningkatan SDM melalui dibimtek
7	Prosentase fasilitas umum yang dilengkapi WIFI	2	4	4	100,00%	Ditunjang dana APBD yang memadahi
8	Prosentase wartedl/warnet yang berijin	85%	90%	90%	100,00%	Dengan mengoptimalkan sosialisasi kepada pemilik warnet/Wartel
9	Prosentase menara telekomunikasi yang berijin	85%	90%	70%	77,78%	Banyaknya warnet yang tutup
10	Prosentase informasi yang diamankan	80%	80%	80%	100,00%	Penyampaian Sosialisasi Informasi sekala prioritas kepada SKPD

Sumber : Dinas Kominfo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a) Kurangnya dukungan anggaran terutama bagi pengembangan sarana Teknologi Informasi sebagai penunjang kegiatan operasional dan adanya overlapping program dan kegiatan dengan Bagian Humas dan Protokol;
- b) Kurangnya Sumber daya aparatur secara kuantitas dan kompetensi;

- c) Bandwith yang disediakan PT Telkom tidak stabil dan belum mencukupi kebutuhan bandwith di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d) Penggunaan SIAKEL di 29 Kelurahan belum optimal;
- e) Kebutuhan perangkat kurang memadai untuk mengembangkan jaringan LAN/WAN Kota Probolinggo;
- f) Belum adanya kontribusi nyata dari forum kehumasan;

2.2.2. Urusan Pilihan

2.2.2.1. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian meliputi sub urusan pertanian, sub urusan peternakan, dan sub urusan perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Pada tahun 2016 disediakan anggaran Belanja Langsung berjumlah Rp 22.202.408.900,38 dan realisasinya sebesar Rp 15.374.027.224,00 atau 69,24%. Program – program pokok yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- d. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- g. Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Pertanian diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.89 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PERTANIAN TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian (padi dan jagung)					
	- Padi	6,8 kw/ha	6,54 kw/ha	6,85 kw/ha	104.74	
	- Jagung	7,4 kw/ha	7,04 kw/ha	7,00 kw/ha	99.43	
2	Persentase terpantainya jaminan keamanan pangan asal hewan yang ASUH	2,293	2.252 ekor	2,295	0	
3	Persentase peningkatan populasi ternak					
	- Sapi Potong	9,217	0	9,592	4	
	- Sapi Perah	216	0	217	0	
	- Kambing	7,547	0	7,703	2	
	- Domba	8,535	0	8,886	4	
	- Ayam Buras	77,205	0	78,761	2	
4	Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Daging, Telur, dan Susu)					
	- Daging (ton)	2,204	0	2,330	6	
	- Susu (liter)	437	0	439	0	
	- Telur (ton)	164	0	122	(26)	

5	Jumlah Kelompok tani yang meningkat kemampuan kelompok taninya (kelompok tani)	-	2	2	100
---	--	---	---	---	-----

Sumber : Dinas Pertanian Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

1. Keterbatasan lahan pertanian yang memproduksi tanaman pangan;
2. Masih kurangnya frekuensi kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada petani/kelompok tani baik menyangkut penguatan kelembagaan maupun implementasi teknologi tepat guna.

2.2.2.2. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Wilayah Kota Probolinggo pada dasarnya tidak memiliki potensi/kandungan terukur menyangkut energi dan sumber daya mineral yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu ruang lingkup penyelenggaraan Urusan ini oleh Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan selaku pengampu pada tahun 2016 berupa aktivitas pembinaan dan pengawasan, yaitu:

- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.

Sedangkan alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2016 sebesar Rp 705.617.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 553.835.750,00 atau 78,49%.

Adapun Kinerja atas pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.90 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perusahaan pengguna air tanah yang ber-SIPA	35,41%	35,41%	37,97%	107%	Persentase perusahaan pengguna air tanah yang ber-SIPA di dukung oleh fasilitasi dan koordinasi dengan dukungan anggaran dari kegiatan Sosialisasi air tanah Serta Kegiatan Pembinaan dan Pendataan terhadap pengguna air tanah (masyarakat dan Petani)
2	Persentase Perusahaan pengguna air tanah yang telah memiliki meteran air	34,77%	34,77%	89,60%	258%	Persentase Perusahaan pengguna air tanah yang telah memiliki meteran air di dukung oleh fasilitasi dan koordinasi dengan dukungan anggaran pada kegiatan Koordinasi dan Pendataan tentang hasil produksi dibidang Pertambangan serta kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	79,4%	79,4%	90,25%	114%	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik di dukung oleh anggaran kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Sarana Informasi Pemanfaatan dan Penghematan hasil Pertambangan dan Energi • Pemanfaatan, Penghematan Energi dan Air • Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan • Pengembangan dan Peningkatana Energi Baru Terbarukan

4	Persentase pemenuhan bahan bakar	95,25%	95,25%	98,45%	103%	Persentase pemenuhan bahan bakar di dukung oleh fasilitasi dan koordinasi dengan anggaran kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring, evaluasi dan pelaporan • Pemanfaatan, Penghematan Energi dan air • Pembinaan dan Pendataan Terhadap Pemanfaatan BBM
---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	---

Sumber : Dinas Koperindag Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Adanya proses verifikasi ulang terhadap penerima manfaat bantuan Pompa Air dan Rak Bensin yang dilaksanakan setelah DPA ditetapkan, menyebabkan penurunan jumlah penerima manfaat yang berimbas pada berkurangnya jumlah serapan anggaran.
- b. Berkurangnya Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah yang berdasarkan undangan Instansi Terkait menyebabkan Sisa lebih Penggunaan Anggaran Cukup Tinggi

2.2.2.3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah yang memiliki wilayah laut dan sebagian masyarakat Kota Probolinggo berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan, pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Probolinggo diarahkan untuk meningkatkan produksi. Agar produksi nelayan dan pembudidaya ikan memiliki pasar yang tumbuh secara pasti, pembangunan kelautan dan perikanan juga diarahkan untuk mengembangkan budaya mengkonsumsi ikan di masyarakat.

Program - program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengampu Urusan ini pada tahun 2016 yaitu :

- a. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- e. Program Revitalisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- g. Peningkatan Produksi Perikanan
- h. Program Pengelolaan Sumberdaya laut dan Pesisir
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan kawasan Konservasi
- j. Program Peningkatan Pengawasan SDKP dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta SDM Pengawasan
- k. Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Untuk melaksanakan program - program pembangunan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo memperoleh anggaran Belanja sebesar Rp

15.253.841.657,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 14.358.748.741,00 atau 94,13%.

Kinerja atas pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut

**Tabel 2.91 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	447.383 Ton	458.568 Ton	487.21 Ton	106%	Target peningkatan produksi budidaya perikanan tercapai karena didukung oleh program peningkatan produksi perikanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sosialisasi kepada pembudidaya ikan, serta didukung oleh BBI yang menghasilkan benih berkualitas dan menyediakan layanan uji laboratorium perikanan bagi pembudidaya ikan.
2	Prosentase Peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	1.23	1.25	1.85	147%	Target peningkatan NTPi tercapai karena didukung oleh program pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan melalui sosialisasi serta pembinaan teknis kepada pembudidaya yang mendorong pembudidaya ikan untuk mengembangkan usaha dibidang perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP)
3	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	15082.53 Ton	15,308.768 Ton	19,748.586 Ton	129%	Target peningkatan produksi perikanan tangkap tercapai karena didukung oleh program pengembangan perikanan tangkap melalui bantuan alat tangkap dan sosialisasi serta bimtek teknologi alat tangkap ramah lingkungan
4	Prosentase Peningkatan Angka konsumsi Ikan Perkapita	32.97 Kg/Kapita/Th	33.63 Kg/Kapita/Th	34.315 Kg/Kapita/Th	102%	Tidak memenuhi target karena setelah diverifikasi ada warga yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan yaitu 1 meninggal dunia

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo (diolah)

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- Terbatasnya waktu pelaksanaan Perubahan APBD 2016 menyebabkan beberapa pekerjaan tidak dapat direalisasikan karena tidak cukupnya waktu untuk proses pengadaan dan tidak tersedianya barang yang dibutuhkan dalam waktu singkat.
- Target produksi benih nila salin pada kegiatan Pembenihan Ikan Air Payau tidak dapat tercapai dan hanya terealisasi sebesar 43% (dari target 350.000

ekor realisasi 150.000 ekor). Hal ini disebabkan karena Calon Induk yang dimiliki belum cukup matang untuk memproduksi sehingga produksi benih yang dihasilkan tidak maksimal.

2.2.2.4. Urusan Pariwisata

Sesuai dengan genealoginya, aktivitas pariwisata memiliki dimensi dan atau berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sosial - budaya. Pada aspek ekonomi, jasa pariwisata terutama dapat menumbuhkan sektor jasa (hotel, restoran, transportasi) yang menyerap tenaga kerja. Pada aspek sosial - budaya, pariwisata dapat mendorong masyarakat setempat memperoleh cara pandang baru dalam menjalani kehidupan sehari - hari secara lebih responsif, produktif, kompetitif.

Pada tahun 2016 anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sebagai pengampu Urusan ini sebesar Rp 2.163.960.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 2.055.799.600,00 atau 95%. Adapun program - program pokok yang dilaksanakan sebanyak tiga, yaitu :

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan.

Kinerja atas pelaksanaan Urusan Pariwisata diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut

**Tabel 2.92 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PARIWISATA TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum	65	65	71.97	111%	karena tidak adanya tarif sehingga pengunjung antusias untuk melihat koleksi museum
2	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengunjung Kolam Renang	65	65	78.96	121%	kebersihan air kolam serta pengemasan promosi kolam renang maka pengunjung kolam sangat antusias
3	Angka kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	1,759	1,500	4,298	287%	adanya peningkatan angka kedatangan kapal pesiar ke kota probolinggo sebanyak 14 kali selama tahun 2016
4	Angka kunjungan wisatawan nusantara (orang)	516,327	150,000	539,488	360%	meningkatnya kualitas pelayanan wisata di beberapa daya tarik wisata
5	Rata-rata lama tinggal (di hotel)	2 hari	2 hari	2 hari	100%	semakin banyak hotel yang berdiri di kota probolinggo sebanyak 22 hotel tahun 2016 serta semakin perkembangannya wisata
6	Presentase SDM pariwisata tersertifikasi	5.60%	5.60%	30.77%	549%	sebagai apresiasi pemerintah kota probolinggo untuk meningkatkan profesionalisme guide dalam melayani wisatawan dalam rangka pengembangan pariwisata

2.2.2.5. Urusan Perdagangan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan. Pada tahun 2016 dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.284.258.288,00 dan realisasinya Rp 1.236.291.938,00 atau 19,67%. Rendahnya tingkat penyerapan karena kegiatan revitalisasi pasar tradisional dengan nilai anggaran Rp 4.803.842.117,00 tidak direalisasikan belanja modalnya.

Adapun program pembangunan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Kinerja atas pelaksanaan Urusan Perdagangan diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut

**Tabel 2.93 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	6,21%	0,50%	0,81	162%	Fasilitasi dengan kegiatan Bimtek tentang tatacara ekspor disamping Meningkatnya permintaan Negara Tujuan Ekspor terhadap hasil industri manufaktur.
2	Persentase peningkatan jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah	19,85%	20,00%	29,48	147,40%	Meningkatnya Kesadaran Pemilik Timbangan untuk melakukan Tera Ulang melalui kegiatan sosialisasi dan intensifikasi melalui undangan
3	Jumlah Pelaku Wirausaha (Pedagang) Baru yang Memiliki Ijin	715	200	371	185,50%	Di dukung oleh kegiatan sosialisasi terkait dengan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Sumber : Dinas Koperindag Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Kegiatan revitalisasi pasar tidak dapat dilaksanakan, terkait dengan dana yang tersedia untuk pembangunan TPS kurang dan Pedagang kurang sepatutnya terhadap design yang ditawarkan sehingga berimbas kepada tahapan kegiatan berikutnya
- b. Terjadinya Penumpukan Kegiatan di akhir tahun berimbas pada tidak terlaksananya jumlah serapan anggaran.
- c. Tidak optimalnya serapan anggaran di Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar negeri dikarenakan Tidak jadi dilaksanakannya Kegiatan BIMTEK EKSPOR P3E yang diselenggarakan oleh Propinsi. Sehingga anggaran untuk pengiriman Peserta kegiatan tersebut tidak terserap.

2.2.2.6. Urusan industri

Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo sebagai pengampu Urusan Industri memperoleh alokasi anggaran Belanja Langsung pada tahun 2016 berjumlah Rp. 2.228.836.785,00 dan pengeluaran definitif sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.617.815.914,00 atau 72,59%. Jumlah dana tersebut digunakan untuk melaksanakan dua program yaitu, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Kinerja atas pelaksanaan Urusan Industri diukur menggunakan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut :

**Tabel 2.94 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
URUSAN INDUSTRI TAHUN 2016**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Volume Industri	758	768	779	101%	Peningkatan Volume Industri ini di dukung oleh meningkatnya kegiatan industri kreatif hasil dari kegiatan pembinaan industri kerajinan
2	Jumlah Sentra Industri/ Cluster	7	8	13	163%	Kenaikan Ini di dukung oleh program Pengembangan Sentra-Sentra industri Potensial melalui kegiatan-kegiatan pembinaan IKM
3	Persentase IKM Bersertifikasi	19%	20,00%	22,87%	114%	Tercapaiannya Jumlah IKM bersertifikasi di dukung oleh kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
4	Persentase IKM yang mengikuti MEA	0	0,00%	0,00%	0%	Selama periode tahun 2016 Tidak terdapat IKM yang mengikuti MEA. Capaian tidak tercapai dikarenakan tidak ada IKM yang melakukan <i>Branding</i> atau mengikuti Promosi di luar negeri

Sumber : Dinas Koperindag Kota Probolinggo

Atas capaian kinerja tersebut di atas terdapat kendala antara lain:

- a. Terjadinya Penumpukan Kegiatan di akhir tahun anggaran.
- b. Perencanaan Penganggaran Perjalanan Dinas di kegiatan cukup besar